

**KEBIJAKAN PEMERINTAH TURKI DI MASA ERDOGAN MENUTUP
PERBATASANNYA TERHADAP SURIAH PADA TAHUN 2015**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

RETNO SEPTIANI

20323297

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

**ANALISIS PENYEBAB TURKI MENUTUP PERBATASANNYA
TERHADAP SURIAH PADA TAHUN 2015**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

RETNO SEPTIANI

20323297

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

**Kebijakan Pemerintah Turki di Masa Erdogan Menutup Perbatasannya
Terhadap Suriah pada Tahun 2015**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Dewan Penguji

- 1 Hasbi Aswar, S.IP., M.A., Ph.D.
- 2 Khairul Munzilin, S.IP., M.A.
- 3 Rizki Dian Nursita, S.IP., M.H.I.
- 4 Gusti Eni Putri, S.IP., M.A.

Tanda Tangan

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa proposal skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Selasa, 1 Juli 2025



Retno Septian

DAFTAR ISI

SKRIPSI	1
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
ABSTRAK	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Cakupan penelitian	7
1.5 Tinjauan Pustaka	7
1.6 Kerangka Pemikiran	10
1.7 Argumen Sementara	14
1.8 Metode Penelitian	14
<i>1.8.1 Jenis Penelitian</i>	14
<i>1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian</i>	15
<i>1.8.3 Metode Pengumpulan Data</i>	15
<i>1.8.4 Proses Penelitian</i>	15
1.9 Sistematika Pembahasan	16
BAB 2 KRISIS KONFLIK SURIAH DAN KONTRIBUSI PEMERINTAH TURKI	17
2.1 Latar Belakang dan Penyebab Konflik Suriah	17
2.2 Respon Turki Terhadap Konflik Suriah	21
<i>2.2.1 Respon Politik dan Diplomasi</i>	21
<i>2.2.2 Respon Ekonomi</i>	22

2.2.3	<i>Respon Keamanan</i>	23
2.2.4	<i>Respon Kemanusiaan</i>	24
2.3	Turki Sebagai Negara Tujuan Utama Pengungsi Suriah	25
2.3.1	<i>Memperkuat Posisi Turki</i>	27
2.3.2	<i>Peluang Keanggotaan Uni Eropa</i>	28
2.3.3	<i>Kepedulian Terhadap HAM dan Komitmen dalam Konvensi Jenewa 1951</i> ...	29
2.4	Dinamika Perkembangan Pengungsi Suriah di Turki	29
BAB 3 ANALISIS PERUBAHAN KEBIJAKAN TURKI		33
3.1	Faktor Penyebab Perubahan Kebijakan Turki dari Open Door Policy Menuju Closed Door Policy	33
3.1.1	<i>Dimensi Intentional</i>	35
3.1.2	<i>Dimensi Disposisional</i>	38
3.1.3	<i>Dimensi Struktural</i>	44
3.2	Refleksi Analisis Kebijakan	48
3.3	Recep Tayyip Erdoğan sebagai <i>decision maker</i> utama	51
BAB 4 PENUTUP		54
4.1	Kesimpulan	54
4.2	Rekomendasi	56
DAFTAR PUSTAKA		57

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 langkah-langkah strategis pemerintah Turki dalam dimensi intentional	37
Tabel 3. 2 Indikator Dimensi Disposisional dalam Perubahan Kebijakan Turki...	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar1. 1 Bagan Teori Open Door Policy Walter Carlsnaes11

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perubahan kebijakan luar negeri Turki dalam merespons krisis pengungsi Suriah sejak tahun 2011. Turki awalnya menerapkan *Open Door Policy* sebagai bentuk komitmen kemanusiaan. Namun, kebijakan ini berubah menjadi *Closed Door Policy* akibat tantangan domestik seperti tekanan ekonomi dan ancaman keamanan. Pendekatan teori *Foreign Policy Analysis* yang digunakan dalam penelitian ini memaparkan bahwa kebijakan Turki dipengaruhi oleh tiga dimensi: struktural, disposisional, dan intentional. Dimensi struktural mencakup tekanan eksternal, disposisional mencakup nilai dan persepsi pemimpin Turki, sementara intentional mencakup tujuan strategis kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Turki melalui tiga fase utama: kebijakan pintu terbuka, registrasi dan perlindungan sementara, serta integrasi dan repatriasi sukarela, memberikan dampak sosial, ekonomi, dan politik yang signifikan. Di satu sisi, kebijakan ini menunjukkan komitmen kemanusiaan, namun juga menimbulkan tantangan domestik yang harus dihadapi Turki.

Kata Kunci: Turki, Konflik Suriah, Kebijakan Luar Negeri, Pengungsi Suriah, *Open Door Policy*, *Closed Door Policy*.

ABSTRACT

This study examines Turkey's foreign policy changes in responding to the Syrian refugee crisis since 2011. Turkey initially implemented the Open Door Policy as a humanitarian commitment. However, this policy shifted to a Closed Door Policy due to domestic challenges such as economic pressure and security threats. The Foreign Policy Analysis approach used in this study explains that Turkey's policies are influenced by three dimensions: structural, dispositional, and intentional. The structural dimension covers external pressures, the dispositional dimension includes the values and perceptions of Turkish leaders, while the intentional dimension highlights the strategic objectives of these policies. The research findings show that Turkey's policies went through three main phases: open-door policies, registration and temporary protection, and integration and voluntary repatriation. These policies have had significant social, economic, and political impacts. On one hand, they reflect Turkey's humanitarian commitment, but on the other hand, they also pose domestic challenges that Turkey must address.

Keywords: *Turkey, Syrian Conflict, Foreign Policy, Syrian Refugees, Open Door Policy, Closed Door Policy.*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Munculnya pengungsi Suriah berawal dari konflik internal perebutan kekuasaan pemerintahan yang menimbulkan Perang Saudara tahun 2011. Kawasan Timur Tengah pada tahun 2010-2011 telah terjadi sebuah revolusi politik yang disebut dengan “Arab Spring” (Sahide et al. 2016, 119). Suriah menjadi salah satu bagian dari terjadinya Arab Spring tersebut sehingga banyak muncul konflik internal yang dipicu oleh aksi demonstrasi untuk menggulingkan kepemimpinan Bashar Al-Assad yang dinilai sebagai rezim otoriter.

Masyarakat Suriah yang menginginkan kepemimpinan demokrasi melakukan pemberontakan dengan memunculkan banyak kelompok pemberontak yang terorganisir yang bersatu dalam sebuah kelompok yang disebut sebagai *Free Syrian Army* (FSA) atau Tentara Pembebasan Suriah (Rizqullah et al. 2020, 113). FSA sebagai kelompok oposisi dengan angkatan bersenjata muncul pada pertengahan tahun 2011 yang memiliki tujuan untuk menurunkan kekuasaan rezim Assad. Dengan adanya pemberontakan yang terus terjadi setiap harinya di berbagai wilayah di kota Suriah, pasukan keamanan Suriah di bawah perintah rezim Assad melakukan penangkapan terhadap para demonstran hingga melakukan penganiayaan. PBB melakukan upaya perdamaian dan gencatan senjata yang berakhir gagal akibat kedua belah pihak melanggar upaya yang diberikan.

Konflik Suriah menjadi lebih kompleks akibat adanya aktor lain yang terlibat yang dilatar belakangi oleh adanya perbedaan mazhab antara masyarakat Suriah yaitu menganut mazhab Sunni sedangkan rezim Assad menganut mazhab

Syi'ah (Khan et al. 2017, 592). Rezim Assad didukung oleh Iran dan Hizbullah, sementara pihak oposisi didukung oleh Turki dan Arab Saudi. Konflik yang terus meningkat telah mengancam masyarakat sipil yang membuat mereka terdorong untuk keluar dari Suriah dan mencari perlindungan ke negara tetangga hingga ke kawasan Eropa untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan. Tidak sedikit jumlah masyarakat sipil yang meninggalkan Suriah, sehingga para pengungsi Suriah menyebar ke berbagai negara di sekitarnya. Konflik Suriah yang berkepanjangan mengakibatkan munculnya krisis kemanusiaan terbesar di dunia setelah Perang Dunia Kedua. Kepemimpinan rezim Assad yang otoriter dan kekerasan yang dilakukan terhadap masyarakat Suriah membuat konflik ini terus terjadi hingga menyebabkan ketidakstabilan keadaan ekonomi, sosial maupun politik di Suriah. hal ini mendorong rakyat Suriah meninggalkan negaranya untuk mencari perlindungan dan kehidupan yang lebih layak.

Sekitar 5,6 Juta pengungsi Suriah menyebar ke seluruh negara-negara sekitar Suriah seperti Turki, Lebanon, Yordania, Iran dan juga Mesir. Kelima negara ini terletak paling dekat dengan Suriah, bahkan berbatasan langsung dengan Suriah. Pada tahun 2011, Turki menerima sebanyak 2,93 juta pengungsi, Lebanon menerima sebanyak 768.000 pengungsi Suriah, Yordania menerima sebanyak 611.000 pengungsi Suriah, Irak menerima 304.000, dan Mesir menerima sebanyak 148.000 pengungsi Suriah (UNHCR 2011). Karena konflik Suriah yang berkepanjangan, pengungsi Suriah sangat meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, lebih dari 4 juta pengungsi Suriah berada di lima negara yaitu Lebanon menampung sekitar 1,2 juta pengungsi dari Suriah, Yordania menampung sekitar 650.000 pengungsi Suriah, Turki menampung 1,9 juta pengungsi Suriah lebih

banyak dari negara lain, Irak menampung sebanyak 249.463 pengungsi, dan Mesir menampung 132.375 pengungsi Suriah (Amnesty 2015).

Turki menjadi menjadi negara yang menampung pengungsi Suriah paling banyak di dunia dikarenakan Turki merupakan salah satu negara tujuan bagi para pengungsi Suriah karena memberikan respon yang terbuka dan menerima para pengungsi Suriah untuk mendapatkan perlindungan (Baban, Ilkan, and Rygiel 2016, 44). Turki sebagai negara yang mengadopsi Konvensi Jenewa 1951 serta Protokol 1967 yang menyatakan bahwa Turki memiliki tanggung jawab dalam membantu krisis kemanusiaan yang terjadi di Suriah dengan menerima pengungsi Suriah sejak April 2011 (UNHCR 2019). Keputusan ini diumumkan oleh menteri luar negeri Turki yaitu Ahmet Davutoglu. Turki dibawah kepemimpinan Erdogan mengambil keputusan atas kebijakan *Open Door Policy* didasari oleh prinsip *Zero Problem with Neighbours* dan *Humanitarian Based Approach*, Konvensi Jenewa 1951 dan protokol 1967, serta dorongan dari partai AKP (*Adalet ve Kalkınma Partisi*) yang merupakan partai yang didirikan oleh Erdogan. Dengan adanya keputusan ini menyatakan bahwa Turki membuka perbatasan dengan menerapkan kebijakan *Open Door Policy* bagi para pengungsi Suriah. Kebijakan ini diambil Turki dengan pertimbangan yang berdasarkan kemanusiaan, adanya kesamaan identitas, dan menjadi negara yang berbatasan langsung dengan Suriah. Protokol 1967 telah memperkuat keputusan atas kebijakan *Open Door Policy* sebagai kebijakan Turki yang relevan terhadap aturan hukum yang terdapat pada lingkup internasional.

Keputusan Turki menerapkan kebijakan *Open Door Policy* pada tahun 2011 telah menimbulkan tantangan tersendiri. Kebijakan ini menuai pro dan kontra dari

masyarakat Turki yang mengkhawatirkan jumlah pengungsi Suriah yang masuk ke negaranya dengan jumlah yang besar. Untuk mengurangi kekhawatiran masyarakat, Kebijakan *Open Door Policy* menerapkan dasar-dasar hukum yang terdiri dari *Law on Foreigners and International Protection* yang merupakan bentuk hukum dalam negeri dan Protokol 1967 sebagai hukum internasional (Baban, Ilkan, and Rygiel 2016, 52). *Law on Foreigners and International Protection* (LFIP) sebagai peraturan yang diterapkan pemerintah Turki pada April 2013 yang didalamnya mengatur tentang keberadaan orang asing, terutama pada pengungsi yang berada di Turki. Pada pasal 62 dalam peraturan LFIP, menyatakan bahwa seseorang dari luar kawasan Eropa telah terancam keselamatannya di negaranya sendiri baik dalam hal ras, agama, dan politik yang mengakibatkan ketakutan dan tidak mendapatkan hak perlindungannya maka mereka yang melarikan diri dari negaranya dianggap sebagai pengungsi bersyarat dan mendapatkan izin untuk menetap dan mencari perlindungan di Turki (UNHCR 2014). Dengan adanya peraturan ini, pengungsi Suriah sudah mendapatkan jaminan perlindungan dari Turki. Pengungsi Suriah sendiri tiba di Turki pertama kali pada 28 April 2011 setelah adanya keputusan kebijakan *Open Door Policy* (Kayahan, n.d. 2023).

Law on Foreigners and International Protection (LFIP) mulai diberlakukan pada April 2014, setelah 3 tahun adanya kebijakan *Open Door Policy* (Donelli 2018, 4). LFIP sendiri mengatur seluruh prosedur masuk, tinggal dan keluar dari Turki bagi pengungsi Suriah. Berdasarkan aturan ini, Turki berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi Suriah dengan memberikan tempat tinggal yang layak, memberikan pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan bantuan lainnya. Kebijakan *Open Door Policy* Turki telah memberikan Kamp

pengungsian yang mampu menampung 250.000 pengungsi, dan pemerintah Turki mengizinkan pengungsi Suriah untuk menetap di luar kamp yang telah disediakan. Sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan Turki, banyak lembaga-lembaga internasional yang memberikan bantuan kepada pengungsi Suriah di Turki. lembaga tersebut yaitu: *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)*, *International Organization for Migration (IOM)*, *United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF)*, *World Health Organization (WHO)*, dan *Omni-Communication Assistant (OCHA)* (Alverio et al. 2015).

Dibalik kebijakan *Open Door Policy* yang diterapkan oleh Turki, ada tantangan besar yang mengancam keamanan Turki terutama di wilayah perbatasan. Sejak Oktober 2015 hingga akhir tahun 2016 muncul berbagai serangan teroris yang menyerang wilayah perbatasan Turki. Pemerintah Turki melakukan tindakan ketat terhadap perbatasan terutama dalam pendaftaran pengungsi Suriah yang akan masuk ke Turki (Aras and Mencutek 2015, 198). Pemerintahan Turki dibawah kepemimpinan Erdogan, memberlakukan kebijakan *Closed Door Policy* atau kebijakan tutup pintu tidak resmi yang tidak dinyatakan secara langsung dan resmi, tetapi tindakan Turki yang menutup perbatasan dengan lebih ketat dan membatasi jumlah pengungsi Suriah yang akan masuk (Donelli 2018, 6). Untuk menjaga keamanan negaranya, Turki menerapkan kebijakan *Closed Door Policy* dengan membangun tembok keamanan di sepanjang wilayah perbatasan antara Turki dan Suriah untuk mencegah kembali munculnya serangan teroris.

Berdasarkan paparan yang telah disampaikan sebelumnya mengenai kebijakan *Open Door Policy* yang diterapkan oleh pemerintah Turki sebagai bentuk dukungan kemanusiaan terhadap pengungsi Suriah yang berlangsung sejak April

2011. Kebijakan ini kemudian mengalami perubahan menjadi kebijakan *Closed Door Policy* yang dinyatakan secara tidak resmi. Adanya rasa kebimbangan Pemerintah Turki dalam menanggapi pengungsi Suriah yang menjadi tanggung jawabnya atau stabilitas internal. Pada tahun 2015 menjadi tahun dengan angka tertinggi pengungsi Suriah di Turki, hal ini menyebabkan Turki di sorot oleh berbagai negara karena Presiden Erdogan mengambil keputusan untuk menutup perbatasannya dari pengungsi Suriah yang sebelumnya di terima secara terbuka. Maka memunculkan sebuah gagasan baru untuk mengetahui penyebab perubahan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dibahas sehingga diberi judul “*Pemerintah Turki di masa Erdogan menutup Perbatasannya Terhadap Suriah Pada Tahun 2015*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang diambil dari penelitian ini adalah “Mengapa Pemerintah Turki di masa Erdogan menutup perbatasannya terhadap Suriah pada tahun 2015?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Peneliti memiliki tujuan penelitian untuk mengetahui hasil dan jawaban dari identifikasi masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Sebagai bentuk upaya untuk mengetahui arah penelitian dan pencapaian dari penelitian ini, maka peneliti memiliki tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya Pemerintah Turki dalam menangani krisis pengungsi Suriah yang masuk ke negaranya

2. Untuk mengetahui penyebab pemerintah Turki menutup perbatasannya dengan Suriah pada tahun 2015 ketika kebijakan *Open Door Policy* masih diterapkan.

1.4 Cakupan penelitian

Cakupan penelitian ini difokuskan pada analisis penyebab di balik keputusan Turki untuk mulai menutup sebagian perbatasannya terhadap pengungsi Suriah pada tahun 2015, meskipun secara resmi kebijakan *Open Door Policy* masih diterapkan. Penelitian ini mencakup kajian terhadap dinamika domestik seperti meningkatnya tekanan politik dari partai oposisi, perubahan opini publik yang semakin menunjukkan sentimen anti-imigran, serta pemberitaan negatif media terhadap pengungsi. Selain itu, faktor keamanan nasional juga menjadi fokus utama, termasuk peningkatan serangan terorisme, aktivitas kelompok militan di perbatasan. Penelitian ini akan menelusuri bagaimana faktor-faktor tersebut mendorong pemerintah Turki melakukan pengetatan perbatasan secara bertahap sebagai bentuk dari *Closed Door Policy*.

1.5 Tinjauan Pustaka

Untuk lebih mengetahui dan memahami masalah yang dibahas pada penelitian ini, maka penulis melakukan tinjauan pustaka atau mereview kembali pustaka yang telah ada sebelumnya. Dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis berfokus pada perubahan kebijakan *Open Door Policy* menjadi *Closed Door Policy* Turki terhadap pengungsi Suriah dengan merujuk pada beberapa karya ilmiah yang

relevan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang menjadi landasan teoritis penulis diantaranya yaitu :

Penelitian pertama yang relevan dengan penelitian ini yaitu jurnal yang berjudul "*New Refugee Policy: Is Turkey Closing the Door*" yang ditulis oleh Deniz Alca. Pada penelitian ini, penulis berfokus pada perubahan kebijakan migrasi Turki dengan mengubah arah politiknya terhadap pengungsi yang berasal dari zona konflik di kawasan Afrika dan Timur Tengah. Pada awalnya Turki mengizinkan para imigran masuk ke wilayahnya dengan terbuka, tetapi dengan jumlah imigran yang semakin meningkat secara drastis Turki tidak mampu lagi menampung imigran secara terbuka. Dengan adanya perubahan kebijakan "tutup pintu", Turki tidak benar-benar menutup perbatasan secara menyeluruh, penutupan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah pengungsi yang masuk melalui permohonan status perlindungan sementara (Alca 2023, 125).

Penelitian kedua yang berjudul "*The international migration and foreign policy nexus: the case of Syrian refugee crisis and Turkey*" yang ditulis oleh N. Ela Gokalp Aras dan Zeynep Sahin Mencutek yang membahas keterkaitan erat antara kebijakan luar negeri Turki dan kebijakan imigrasi serta suaka dalam menghadapi krisis pengungsi Suriah. Awalnya, Turki menerapkan kebijakan "*Open Door Policy*" dengan pendekatan kemanusiaan sebagai bagian dari ambisi kebijakan luar negerinya untuk tampil sebagai kekuatan penentu tatanan regional. Namun, seiring dengan isolasi diplomatik Turki dan meningkatnya jumlah pengungsi, terjadi perubahan pendekatan ke arah kebijakan penutupan perbatasan secara tidak langsung yang berfokus pada isu keamanan, perlindungan sementara, pemulangan sukarela, serta pembagian beban (*burden-sharing*). Jurnal ini menekankan

pentingnya dimensi kebijakan luar negeri dalam memahami evolusi kebijakan pengungsi di Turki (Aras dan Mencutek 2015, 193).

Penelitian ketiga dengan judul “*Policies and Discourses Regarding the Syrian Diaspora in Contemporary Turkey: from ‘Refugee Crisis’ to ‘Minority Problem’*” ditulis oleh J.E. Chemin dan N. Ela Gokalp Aras yang membahas transformasi kerangka kebijakan dan wacana tentang pengungsi Suriah di Turki sejak awal krisis hingga menjadi 'masalah minoritas'. Pada awalnya, Turki menerapkan *Open Door Policy* dengan narasi kemanusiaan dan religious sebagai bentuk solidaritas Muslim. Sebagian masyarakat turki masih menggembar-gemborkan kebaikan dan persaudaraan, sementara sebagian lainnya mempertanyakan beban ekonomi, keamanan, dan identitas dengan membawa wacana dari “krisis pengungsi” ke arah “masalah minoritas”. Dengan demikian penelitian ini menyoroti bagaimana perpindahan kebijakan tersebut sangat dipengaruhi oleh diskursus negara dan masyarakat, dari solidaritas Islami menuju regresi dan eksklusi (Chemin dan Aras 2017, 321).

Penelitian keempat berjudul “Perubahan Kebijakan Turki: *Open Door Policy* Menjadi *Border Wall Project* Tahun 2015-2022” yang ditulis oleh Wilda Daffania Abidin Prihandono Wibowo yang membahas perubahan kebijakan luar negeri Turki dari kebijakan *Open Door Policy* menjadi pembatasan pada periode 2015–2022, khususnya terhadap imigran Suriah dan Afghanistan. Melalui pendekatan kualitatif eksplanatif dan teori perubahan kebijakan luar negeri Joakim Eidenfalk, penelitian ini mengkaji faktor-faktor domestik seperti tekanan partai oposisi, perubahan opini publik, dan pengaruh media, serta faktor internasional seperti meningkatnya ancaman terorisme, penyelundupan manusia dan narkoba di

wilayah perbatasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kebijakan dilakukan sebagai respons terhadap kekhawatiran keamanan nasional dan tekanan sosial-politik di dalam negeri akibat lonjakan jumlah pencari suaka. Kebijakan penutupan perbatasan dipilih sebagai solusi penguatan kontrol perbatasan guna melindungi stabilitas internal Turki (Abidin dan Wibowo 2024, 1).

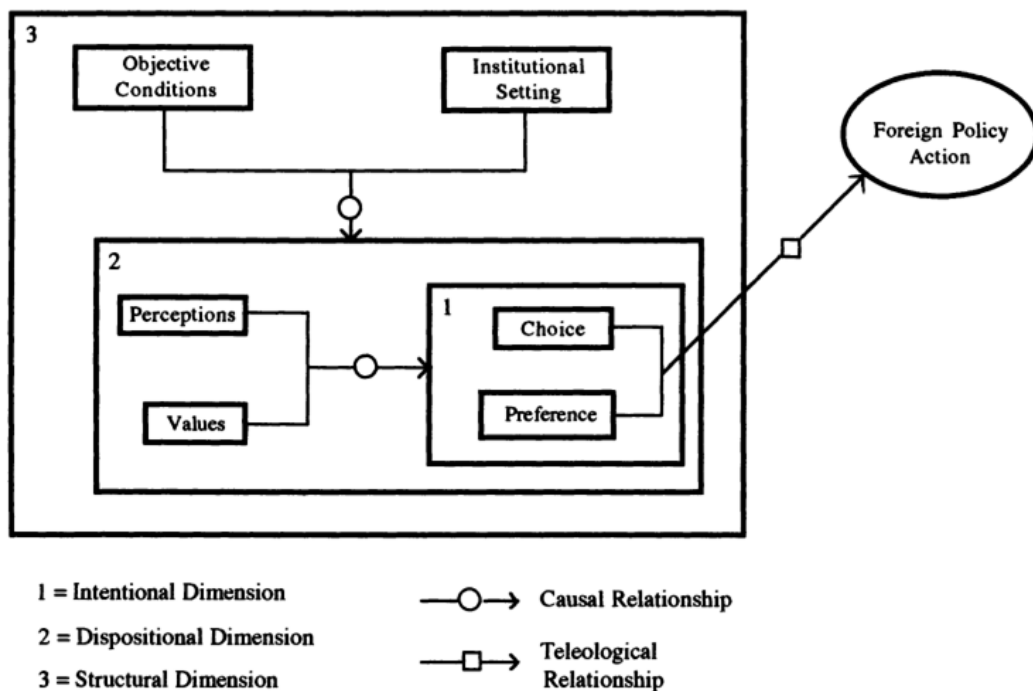
Dari keempat penelitian yang telah ditinjau sebelumnya, penulis berupaya melengkapi penelitian sebelumnya dengan pembahasan yang berbeda. Secara garis besar, penelitian sebelumnya berfokus pada adanya keputusan dalam kebijakannya menghadapi pengungsi Suriah yang masuk dalam implementasi kebijakan *Open Door Policy*. Pembahasan lainnya adanya perubahan kebijakan Turki yang menutup pintu perbatasan secara tidak resmi terhadap pengungsi dari Timur Tengah dan Afrika. Penulis akan membahas fokus masalah yang berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu dengan berfokus pada faktor-faktor penyebab Turki mengambil keputusan secara tidak resmi menerapkan kebijakan *Closed Door Policy* ketika kebijakan *Open Door Policy* masih diterapkan terhadap pengungsi Suriah menggunakan teori *Foreign Policy Analysis* yang dikemukakan oleh Walter Carlsnaes.

1.6 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis mengenai perubahan kebijakan Turki yang menutup perbatasannya dan membatasi pengungsi Suriah masuk disaat kebijakan *Open Door Policy* masih berlangsung. Maka kerangka teori yang digunakan yaitu teori *Foreign Policy Analysis* yang dikemukakan oleh Walter Carlsnaes. Menurut Walter Carlsnaes, foreign policy analysis merupakan proses

dinamis dari pemerintahan dan struktur yang mempengaruhi dari waktu ke waktu, oleh karena itu diperlukan sebuah model dinamis dalam menganalisis kebijakan luar negeri (Carlsnaes 1992). Kebijakan luar negeri terbentuk dari tindakan-tindakan yang dinyatakan sebagai bentuk tujuan, komitmen, serta arahan yang jelas dan dibentuk oleh suatu pemerintahan negara yang dipengaruhi oleh objek, kondisi, aktor pemerintah dan nonpemerintah.

Gambar1. 1 Bagan Foreign Policy Analysis Walter Carlsnaes



Sumber : (Carlsnaes 1992)

Menurut Walter Carlsnaes kebijakan luar negeri ini digambarkan dalam tiga dimensi, yaitu dimensi intensional, dimensi disposisi, dan dimensi struktural (Carlsnaes 1992). Pertama, Dimensi intensional menjelaskan sebab dan tujuan dari diputuskannya sebuah kebijakan luar negeri. Pada dimensi ini juga menjelaskan

alasan mengapa diambilnya kebijakan luar negeri tersebut dan memahami bagaimana sebab akibat yang terjadi. Biasanya dimensi ini melihat bagaimana maksud dan tujuan yang subjektif dari aktor yang berperan dalam pengambilan keputusan luar negeri (Carlsnaes 1992).

Kedua, dimensi disposisi yang berkaitan dengan sifat-sifat yang mendasari aktor-aktor atau sebuah negara dalam mempengaruhi perilaku kebijakan luar negeri. Faktor-faktor ini akan menjadi alasan diambilnya sebuah kebijakan luar negeri, dan keyakinan politik yang dimiliki aktor-aktor akan menjadi dasar pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Ketiga, dimensi struktural yang mengarah pada pengaruh lingkungan eksternal dan internal yang membatasi atau mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Dimensi ini melihat kondisi yang lebih besar yang dapat membentuk batasan-batasan dan peluang bagi pembuat kebijakan luar negeri. Pada bagian ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi arah kebijakan luar negeri sebuah negara itu diubah diantaranya yaitu faktor nasional, internasional, ekonomi, sosial, budaya, dan juga faktor keamanan (Carlsnaes, Risse, and Simmons 2013).

Ketiga dimensi tersebut saling berhubungan erat satu sama lain karena adanya hubungan sebab-akibat yang saling berkaiytan. Hubungan antar ketiganya bersifat hierarkis dan dinamis yang dimana konteks struktural memengaruhi disposisi internal negara, yang kemudian membentuk kerangka berpikir dan preferensi aktor dalam pengambilan keputusan intensional. Dengan demikian, keputusan kebijakan luar negeri merupakan hasil interaksi kompleks antara kondisi eksternal, orientasi internal, dan kehendak subjektif pelaku (Carlsnaes, Risse, and Simmons 2013).

Pada penelitian ini dimulai dengan membahas kebijakan luar negeri Turki yaitu *Open Door Policy* yang kemudian mempengaruhi pada dimensi struktural dan dimensi intensional. Pada dimensi struktural ini melihat bahwa kondisi objek Suriah dapat mengancam keamanan nasional Turki. Sementara pengaturan institusi sejak diterbitkannya kebijakan *Open Door Policy* di bawah kepemimpinan Erdogan dan sistem internasionalnya yang memiliki pandangan ideologis tertentu mengenai Suriah dan stabilitas regional.

Ketiga dimensi dari *Foreign Policy Analysis* ini akan digunakan pada penelitian ini untuk menganalisis penyebab keputusan kebijakan Turki dalam menutup perbatasannya dan membatasi jumlah pengungsi Suriah yang berada di Turki ketika adanya kebijakan *Open Door Policy*. Pada dimensi intensional menjelaskan alasan Pemerintah Turki mengambil keputusan untuk tidak menerima pengungsi Suriah kembali. Pada dimensi disposisi, Perspektif Turki mengenai masalah keamanan menjadi salah satu faktor penting penyebab arah perubahan kebijakan luar negerinya. Pemberontakan yang terjadi di Suriah pada bulan maret 2011 telah mengganggu hubungan persahabatan kedua negara tersebut. Kemudian munculnya kelompok militan dalam konflik Suriah memperkeruh kondisi Suriah yang sudah rumit. Dan dimensi struktural yang menjelaskan banyaknya jumlah populasi pengungsi Suriah di Turki membuat masyarakat di Turki beranggapan bahwa kegagalan ekonomi yang dialami oleh Turki disebabkan oleh mereka (Kirisci 2014).

Dari penjelasan ketiga dimensi tersebut akan digabungkan menjadi alasan penyebab Turki mengambil kebijakan luar negeri nya dengan menutup perbatasannya. Pada saat yang bersamaan kebijakan *Open Door Policy* masih

berlangsung sehingga kebijakan *Close Door Policy* yang diambil Turki hanya bersifat tidak langsung.

1.7 Argumen Sementara

Jumlah pengungsi yang semakin meningkat setiap tahunnya telah memberikan dampak negatif bagi Turki. Keadaan yang memburuk membuat pemerintah Turki mengubah kebijakannya dengan menutup pintu perbatasan antara Turki dan Suriah yang dimana Turki membatasi jumlah pengungsi Suriah yang masuk. Berdasarkan teori *Foreign Policy Analysis* yang dikemukakan oleh Walter Carlsnaes ada 3 dimensi yang menjadi alasan Turki melakukan perubahan atas kebijakan luar negerinya. Pertama, *dispositional dimension* dimana pemerintah Turki menganggap dibukanya perbatasan telah menjadi ancaman keamanan terutama masuknya pengungsi Suriah. Kedua, *structural dimension* yaitu adanya ketidakstabilan perekonomian Turki, perbedaan latar belakang sosial budaya antara masyarakat lokal dan pengungsi Suriah serta timbulnya ancaman terorisme dari luar. dan ketiga, *intentional dimension* merupakan keputusan Turki untuk menutup perbatasannya dari pengungsi Suriah.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang menjelaskan hasil dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian kualitatif digunakan dengan tujuan untuk mengetahui fenomena yang terjadi pada subjek penelitian seperti persepsi, perilaku, motivasi, dan tindakan (Moleong 2009, 6).

penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menjawab permasalahan penyebab adanya penutupan perbatasan Suriah selama kebijakan *Open Door Policy* diterapkan Turki sebagai upaya penyelesaian masalah krisis pengungsi Suriah di Turki.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini yaitu Pemerintah Turki sebagai negara yang menutup perbatasannya dengan Suriah pada tahun 2015 selama kebijakan *Open Door Policy* sedang berlangsung. Objek dari penelitian ini yaitu penutupan perbatasan antara Turki dan Suriah pada tahun 2015 selama kebijakan *Open Door Policy* sedang berlangsung untuk mengatasi pengungsi Suriah.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan data-data sekunder yang diambil dengan metode studi pustaka yang berasal dari buku, jurnal dan literatur resmi lainnya. Penulis menggunakan metode ini dikarenakan keterbatasan penulis terhadap lokasi subjek dan objek yang diteliti.

1.8.4 Proses Penelitian

Proses pengumpulan data dilakukan dengan beberapa tahap, yang pertama penulis mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan. Berikutnya, penulis mengkaji dan memahami data dan informasi yang didapat. Kemudian dari pemahaman yang didapat, penulis mengembangkan data dan informasi tersebut dengan deskriptif dan membagi menjadi beberapa sub bab yang merupakan fokus penelitian ini. Terakhir, penulis mendeskripsikan analisis data-data serta informasi yang didapat sehingga dapat menjawab rumusan masalah dari penelitian yang dilakukan.

1.9 Sistematika Pembahasan

Penulis membagi tulisannya menjadi empat BAB yang terdiri dari :

- BAB 1 Pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- BAB 2 membahas terkait perkembangan konflik di Suriah, serta keterkaitan Turki dalam merespon adanya konflik di Suriah. Pada BAB ini juga memaparkan perkembangan pengungsi Suriah di Turki sehingga memunculkan berbagai tantangan bagi Turki.
- BAB 3 berisikan pengaplikasian teori yang diambil oleh peneliti yang relevan terkait penyebab terjadinya penutupan perbatasan antara Turki dan Suriah tahun 2015 saat kebijakan *Open Door Policy* Turki masih diterapkan terhadap pengungsi Suriah.
- BAB 4 berisikan kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian ini.

BAB 2

KRISIS KONFLIK SURIAH DAN KONTRIBUSI PEMERINTAH TURKI

Pada Bab I, penulis telah memaparkan pembahasan mulai dari latar belakang hingga sistematika pembahasan yang menjadi landasan penelitian ini. Selanjutnya akan digunakan Bab II untuk menjelaskan konteks yang mendukung pemahaman lebih dalam mengenai pembahasan pada penelitian ini. Pada BAB II ini penulis akan memaparkan permasalahan yang akan dibahas dalam 4 sub bab utama, dimulai dari perkembangan konflik Suriah, kemudian respon Turki dalam konflik Suriah tersebut, alasan Turki menjadi negara tujuan bagi pengungsi Suriah, dan perkembangan pengungsi Suriah di Turki.

2.1 Latar Belakang dan Penyebab Konflik Suriah

Konflik yang terjadi di Suriah merupakan efek domino dari fenomena *Arab Spring* yang terjadi di Dunia Arab yang berdampak pada keadaan dimana masyarakat Suriah menginginkan perubahan dalam pemerintahan mereka yang saat itu dipimpin oleh rezim Bashar al-Assad (Sahide et al. 2016). Bashar al-Assad merupakan pemimpin Suriah sekaligus anak dari presiden Suriah sebelumnya, yaitu Hafez al-Assad. Keluarga al-Assad telah membangun dinasti kekuasaannya melalui Partai Ba'ath sebagai kekuatan tunggal selama lebih dari 5 dekade di Turki yang berdasarkan empat pilar rezim politiknya, yaitu klan al-Assad memiliki kekuasaan penuh di dalam pemerintahan, persatuan kelompok minoritas syiah Alawi, mengontrol seluruh aparaturnya militer-intelijen, dan Partai Ba'ath sebagai partai penguasa tunggal dalam sistem politik. Selain itu, Bashar al-Assad mendapatkan dukungan politik dari beberapa negara seperti Rusia, Iran, dan Tiongkok

(Hermawan 2016). Dengan menjaga keseimbangan keempat pilar tersebut serta dukungan yang diberikan oleh Rusia, Iran, dan Tiongkok, membuat konflik di Suriah sampai saat ini belum menemui jalan keluar.

Di samping itu, konflik Suriah juga dilatarbelakangi oleh berbagai macam pandangan, mulai dari persoalan sosial, ekonomi, dan politik di dalam negerinya. Tingginya jumlah pengangguran, tingginya inflasi, terbatasnya kesempatan untuk mobilitas sosial, pembatasan kebebasan politik, dan aparat keamanan yang represif menjadi masalah-masalah yang terjadi di Suriah. Kedua, juga tuntutan sebagian penduduk Suriah agar dilakukan reformasi dan penggantian rezim Bashar al Assad. Sejak tahun 1963, pemerintahan Suriah didominasi oleh Partai Baath, kemudian keluarga al-Assad, yakni Hafidz al-Assad yang memerintah sejak tahun 1970 hingga kematiannya di tahun 2000, dan digantikan oleh putranya, yakni Bashar al-Assad dan memerintah sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang (Khan and Khan 2017). Selama empat puluh tahun di bawah pemerintahan klan Assad (Hafez al-Assad dan anaknya Bashar al-Assad) pembangunan sosial dan ekonomi Suriah masih jauh dari kata memuaskan. Suriah tergolong dalam negara berkembang yang berpendapatan menengah (Sahide et al. 2016). Perekonomiannya ditopang oleh minyak dan pertanian, namun sejak 2004 Suriah dikenai sanksi ekonomi oleh Amerika Serikat yang melarang atau membatasi ekspor-impor ke Suriah (Sulaiman 2013).

Situasi yang seperti itu, sangat wajar apabila muncul demo anti pemerintah dan keinginan perubahan rezim dari kalangan masyarakat Suriah. Klan Assad memang dipandang telah berkuasa terlalu lama sehingga wajar ada kejenuhan

politik yang dialami oleh hampir seluruh masyarakat Suriah. Pada Maret 2011, seiring dengan gelombang pemberontakan di negara-negara Arab, seperti Mesir dan Tunisia, aksi-aksi demo pun juga terjadi di Suriah (Hermawan 2016). Para pengunjuk rasa memiliki berbagai tuntutan, mulai dari menuntut reformasi, mundurnya Presiden Bashar al-Assad, dibukanya kebebasan mendirikan partai politik, kebebasan berbicara, dan perbaikan ekonomi.

Menurut pandangan Jose Rizal, tuntutan demokrasi di Suriah adalah pemicu konflik dan peperangan, bukan faktor utama penyebab konflik dan peperangan itu sendiri (Fahham and Kartaatmadja 2014). Pandangan Jose ada benarnya terutama jika dikaitkan pada aktor-aktor yang terlibat di dalam konflik. Pada awalnya yang berhadapan dalam konflik Suriah adalah antara rezim Bashar al-Assad dengan pihak oposisi, namun dalam perkembangannya konflik tersebut justru meluas eskalasinya, akibat masuknya berbagai pejuang jihad seperti al-Qaeda ke Suriah (Fahham and Kartaatmadja 2014).

Konflik di Suriah termasuk kategori konflik *state-based armed conflict* yang dimana konflik tersebut melibatkan pemerintahan negara Suriah itu sendiri yaitu rezim Assad. Konflik yang terjadi ini berada dalam satu wilayah pemerintahan rezim Assad yang melibatkan pihak-pihak kelompok oposisi, sehingga konflik ini termasuk dalam *intrastate armed conflict*.

Dominasi yang terjadi di Suriah melahirkan diskriminasi terhadap mazhab Sunni dan pembatasan gerakan kelompok Ikhwanul Muslimin, serta melahirkan penguasaan elit Syiah Alawiyah atas berbagai sektor perekonomian di Suriah (Ghafur, 2012). Faktor ini sering dijadikan penyebab konflik dan peperangan di

Suriah sebagai konflik dan peperangan antara paham keagamaan dalam Islam. Suriah dipimpin oleh Bashar al-Assad yang bermazhab Syiah Alawiyah, sementara pihak penentang Assad berasal dari mazhab Islam Sunni. Rezim Assad didukung oleh Iran dan Hizbullah yang bermazhab Syi'ah, sebaliknya penentang Assad didukung oleh Qatar, Saudi Arabia, Turki, al-Qaeda, Jabhat al Nusra yang bermazhab Sunni. Faktor perbedaan mazhab keagamaan sebagai penyebab konflik Suriah juga ditolak oleh Sulaeman, menurutnya faktor mazhab dalam konflik Suriah adalah bukan penyebab utama pemicu konflik. Alasannya karena konflik di Suriah melibatkan banyak aktor, bukan hanya oposisi penentang Assad yang bermazhab Sunni, tetapi juga melibatkan pemimpin-pemimpin negara besar dunia seperti Amerika Serikat, Perancis, Turki, Arab Saudi, Qatar, dan Inggris.

Turki misalnya berambisi untuk menjadi pemain utama di Timur Tengah karena itu negara ini ikut campur dalam konflik Suriah. Qatar dan Arab Saudi takut akan Iran yang membantu Suriah, Israel juga berkepentingan terhadap jatuhnya pemerintahan Assad karena selama ini Suriah bersekutu dengan Iran, Hamas, dan Hizbullah dalam menentang Israel. Suriah bahkan negara yang sangat keras menentang Israel. Sementara negara negara Barat berkepentingan terhadap gas bumi di Suriah (Sulaiman, 2013).

Konflik di Suriah telah menimbulkan kehancuran dan kerugian yang cukup parah pada rakyat Suriah dan perekonomian mereka. Di akhir tahun 2015, masalah yang terjadi di Suriah telah mendorong setidaknya 4,9 juta orang untuk pergi ke pengasingan sebagai pengungsi dan telah menjadikan 6,6 juta orang pengungsi internal – sama dengan sekitar setengah dari jumlah populasi Suriah sebelum

terjadinya perang (World Bank Group 2020). Sebagai akibat dari kehancuran modal fisik, jatuhnya korban jiwa, pengungsian paksa, dan pecahnya jaringan ekonomi, PDB Suriah menyusut lebih dari setengahnya antara tahun 2010 dan 2020.

2.2 Respon Turki Terhadap Konflik Suriah

Turki merupakan salah satu aktor penting dalam memahami dinamika konflik yang terjadi di Suriah sejak tahun 2011. Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Suriah, Turki telah mengambil berbagai langkah yang mencakup aspek politik, ekonomi, keamanan, dan kemanusiaan. Respon yang diberikan Turki terhadap konflik Suriah dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk sebagai berikut:

2.2.1 Respon Politik dan Diplomasi

Turki mengambil berbagai langkah politik dan diplomasi untuk mendukung perubahan rezim di Suriah dan menentang pemerintahan Bashar Al-Assad. Respon politik dan diplomasi ini bertujuan untuk memperkuat posisi Turki sebagai aktor regional yang memiliki pengaruh signifikan di kawasan Timur Tengah. Respon Turki dengan memberikan pernyataan politik melalui presiden Erdogan, pada November 2011, pemerintahan Turki melalui Presiden Recep Tayyip Erdogan secara terbuka meminta Bashar Al-Assad untuk mundur dari jabatannya dan melakukan reformasi demokrasi di Suriah (Luerdi 2016). Pernyataan ini menunjukkan bahwa Turki memosisikan dirinya sebagai pendukung utama oposisi Suriah yang menentang rezim Assad.

Respon dalam bentuk pengakuan *Syrian National Council* (SNC) Turki mengakui *Syrian National Council* (SNC) sebagai perwakilan sah dari masyarakat Suriah dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Djibouti pada tahun 2012 (The New York Times 2012). Langkah ini memberikan legitimasi internasional kepada kelompok oposisi Suriah. Bekerja sama dengan negara-negara barat, Turki menjalin hubungan erat dengan negara-negara anggota NATO, termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis, untuk mendorong intervensi internasional dalam konflik Suriah. Turki juga melakukan diplomasi kepada Dewan Keamanan PBB agar konflik di Suriah menjadi agenda pembahasan penting (The New York Times 2012).

Turki mendorong sekutunya di NATO untuk melakukan intervensi militer di Suriah sebagai solusi untuk menghentikan konflik (Luerdi 2016). Namun, keinginan Turki ini belum mendapatkan dukungan penuh, terutama dari Amerika Serikat yang masih enggan melakukan intervensi militer. Langkah-langkah politik dan diplomasi ini menunjukkan bahwa Turki memainkan peran aktif dalam membangun koalisi internasional untuk menekan rezim Bashar Al-Assad dan mencari solusi bagi konflik di Suriah.

2.2.2 *Respon Ekonomi*

Hubungan ekonomi antara Turki dan Suriah memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian kedua negara. Namun, konflik yang berkepanjangan di Suriah memicu ketegangan ekonomi yang berdampak negatif bagi Turki. Beberapa respon ekonomi yang diberikan Turki yaitu pertama, pemberian sanksi ekonomi Pada 30 November 2011, Turki mengumumkan pemberian sanksi ekonomi

terhadap Suriah. Sanksi tersebut mencakup restriksi penggunaan wilayah udara Turki untuk pengiriman peralatan militer ke Suriah serta penghentian berbagai kerjasama dan transaksi militer dengan pemerintah Suriah (BBC 2011). Kedua, Turki memutus hubungan dengan Bank Sentral Suriah, yang berdampak pada penghentian seluruh kegiatan kredit dan investasi antara kedua negara (BBC 2011). Langkah ini mempengaruhi stabilitas ekonomi Suriah dan menambah tekanan pada rezim Bashar Al-Assad.

Ketiga, Respon balik dari Suriah Sebagai balasan atas sanksi yang diberikan Turki, pemerintah Suriah memutuskan semua impor dari Turki. Langkah ini mempengaruhi perdagangan Turki dengan negara-negara Arab, karena Suriah merupakan jalur penghubung utama bagi perdagangan Turki ke kawasan Timur Tengah (BBC 2011). Respon ekonomi ini menunjukkan bahwa konflik di Suriah tidak hanya berdampak pada aspek politik, tetapi juga menimbulkan konsekuensi ekonomi yang signifikan bagi kedua negara.

2.2.3 Respon Keamanan

Konflik di Suriah menimbulkan berbagai tantangan keamanan bagi Turki, terutama di wilayah perbatasan yang rawan terhadap infiltrasi kelompok militan dan aktivitas terorisme. Adapun respon yang diberikan yaitu dengan Pengetatan perbatasan Turki meningkatkan pengawasan di wilayah perbatasan dengan Suriah untuk mencegah masuknya kelompok bersenjata dan militan. Pemerintah Turki membangun dinding perbatasan sepanjang 900 kilometer untuk memperkuat keamanan (Luerdi 2016). Insiden dengan Rusia Pada tahun 2015, ketegangan dengan Rusia meningkat setelah militer Turki menembak jatuh pesawat Rusia yang

dianggap melanggar wilayah udara Turki di dekat perbatasan dengan Suriah (BBC 2015). Insiden ini menambah kompleksitas situasi keamanan di wilayah tersebut. Ancaman kelompok militan: Wilayah perbatasan Turki dengan Suriah menjadi tempat aktivitas berbagai kelompok militan, termasuk ISIS dan kelompok militan Kurdi (PKK) (Kirisci 2014). Ancaman ini mendorong Turki untuk memperkuat langkah-langkah keamanan domestik dan regional. Respon keamanan yang dilakukan Turki bertujuan untuk melindungi stabilitas nasional dan mencegah dampak negatif dari konflik Suriah yang dapat meluas ke wilayah Turki.

2.2.4 *Respon Kemanusiaan*

Sebagai negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Suriah, Turki menerima jutaan pengungsi Suriah yang melarikan diri dari konflik. Respon kemanusiaan yang dilakukan Turki mencakup berbagai upaya untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada para pengungsi. Respon kemanusiaan yang dilakukan Turki yaitu dengan menerapkan Kebijakan *Open Door Policy* Pada awal konflik, Turki menerapkan kebijakan pintu terbuka yang memungkinkan pengungsi Suriah masuk ke wilayah Turki tanpa pembatasan ketat. Langkah ini mencerminkan komitmen Turki terhadap nilai-nilai kemanusiaan (Agestia, Aruni, and Nau 2023). Menyediakan tempat penampungan: Turki menyediakan berbagai fasilitas penampungan bagi pengungsi Suriah, termasuk kamp-kamp pengungsi di wilayah perbatasan (Luerdi 2016). Kerja sama dengan organisasi internasional: Turki bekerja sama dengan berbagai organisasi internasional, seperti UNHCR, UNICEF, dan WHO, untuk menangani krisis pengungsi (UNHCR 2016). Bantuan yang diberikan mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, pendidikan, dan

pelayanan kesehatan. Namun, kebijakan *Open Door Policy* ini juga memberikan tekanan besar pada sumber daya dan layanan publik di Turki, yang pada akhirnya memaksa pemerintah untuk memperketat kebijakan imigrasi.

2.2.5 *Respon terhadap Kelompok Oposisi di Suriah*

Turki memberikan dukungan penuh kepada kelompok oposisi di Suriah dalam upaya melawan rezim Bashar Al-Assad (Rizqullah et al. 2020). Dukungan ini mencakup berbagai aspek politik, logistik, dan moral. Bentuk respon turki dengan Menyediakan tempat perlindungan Turki memberikan tempat perlindungan bagi dua elemen utama kelompok oposisi, yaitu *Syrian National Council* (SNC) dan *Free Syria Army* (FSA) (The New York Times 2012). Bantuan logistik: Turki memberikan bantuan logistik kepada kelompok oposisi untuk mendukung perjuangan mereka melawan rezim Assad (Ekmekci 2018). Pengakuan internasional Turki mendorong pengakuan internasional terhadap kelompok oposisi Suriah melalui forum-forum diplomasi internasional. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa Turki berupaya untuk memengaruhi dinamika konflik di Suriah dengan mendukung oposisi yang menentang rezim Bashar Al-Assad.

2.3 Turki Sebagai Negara Tujuan Utama Pengungsi Suriah

Secara geografis, Suriah berbatasan langsung dengan Turki sepanjang 822 kilometer di utara. Kedekatan geografis ini menjadikan Turki salah satu negara yang paling terkena dampak konflik berkepanjangan di Suriah. Situasi ini menjadikan Turki sebagai tujuan utama orang-orang yang terancam akibat perang dan kekerasan di Suriah, yang menyebabkan gelombang pengungsi terus mengalir ke negara-negara tersebut. Selain itu, Turki menjadi negara yang menghubungkan

Suriah ke negara-negara Eropa sehingga pengungsi Suriah menjadikan Turki sebagai pintu untuk masuk ke negara Eropa lainnya. Hingga saat ini, menurut catatan UNHCR sebagai badan resmi PBB yang menangani pengungsi, Turki setidaknya telah menampung 2,7 juta pengungsi asal Suriah (UNHCR 2016). Angka tersebut terus meningkat seiring dengan berlanjutnya konflik yang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir di Suriah, sehingga menambah beban sosial, ekonomi, dan kemanusiaan bagi Turki sebagai negara tuan rumah.

Kedatangan warga Suriah pertama kali tercatat pada April 2011 di wilayah perbatasan Hatay, Turki (Cebeci and Judson 2014). Menanggapi peristiwa tersebut, Menteri Luar Negeri Turki saat itu, Ahmet Davutoglu, menyatakan kesiapannya untuk menampung warga Suriah yang terdampak konflik di negara mereka. Tidak lama setelah peristiwa itu, pemerintah Turki mengumumkan kebijakan *Open Door Policy* bagi para pengungsi Suriah dan memberikan mereka “Status Perlindungan Sementara” sebagai bentuk respons kemanusiaan terhadap krisis yang semakin memburuk. Kebijakan ini diikuti oleh lonjakan signifikan jumlah pengungsi yang masuk ke Turki, terutama mulai pertengahan tahun 2011, di mana ribuan warga Suriah tercatat menyeberang ke Turki setiap bulannya. Dalam tahun pertama penerimaan pengungsi, pemerintah Turki mengalokasikan dana sebesar 2,5 miliar Euro dari anggaran nasionalnya untuk menangani kebutuhan para pengungsi, menunjukkan komitmen yang besar dalam menghadapi tantangan kemanusiaan ini (Cebeci and Judson 2014).

Dibalik Kebijakan *Open Door Policy* yang diambil oleh Turki memiliki tujuan dan maksud tertentu yang dapat menguntungkan Turki. Munculnya sebuah

kebijakan dilatarbelakangi oleh kepentingan-kepentingan negara tersebut, dan kepentingan atau alasan Turki menerima pengungsi Suriah yaitu :

2.3.1 Memperkuat Posisi Turki

Kebijakan Turki dalam menerima pengungsi Suriah mencerminkan kepentingan nasionalnya yang signifikan dalam memperkuat pengaruhnya di kawasan Timur Tengah. Hal ini terlihat dari upaya Turki dalam menciptakan pasar terintegrasi di kawasan. Dengan adanya pengungsi Suriah, Turki melakukan pendekatan dengan memberikan fasilitas yang mencukupi terhadap para pengungsi. Pertumbuhan ekonomi Turki yang pesat memberikan keyakinan bahwa negara-negara tersebut mempunyai peluang besar untuk menjadi aktor penting dalam kancah geopolitik. Dengan ambisi yang kuat, Turki berusaha menunjukkan kepada dunia betapa besar kontribusinya dalam mengatasi krisis pengungsi Suriah.

Salah satu langkah konkrit yang dilakukan adalah dengan membangun kamp pengungsi berstandar internasional, sebagai upaya menciptakan kesan positif di mata masyarakat global. Berangkat dari asumsi bahwa konflik di Suriah tidak akan berlangsung lama, Turki berharap investasi besar yang mereka lakukan dapat memperkuat citra mereka sebagai negara yang bertanggung jawab dan berperan aktif dalam isu kemanusiaan di tingkat internasional (Kirisci 2014). Upaya yang dilakukan Turki ini bermaksud untuk mendukung *Human Security* pada wilayah perbatasan Turki. Hal ini juga dapat mempererat rasa solidaritas Turki terhadap negara-negara Islam di sekitarnya.

2.3.2 Peluang Keanggotaan Uni Eropa

Penerimaan Turki terhadap pengungsi Suriah dapat menjadi alat negosiasi strategis dalam upaya negara tersebut untuk bergabung dengan Uni Eropa. Sebagai pintu gerbang utama bagi para pengungsi yang melarikan diri dari perang di Suriah, Turki memainkan peran penting dalam mengelola arus ribuan pengungsi yang seringkali melanjutkan perjalanan berbahaya menuju negara-negara Eropa. Turki memanfaatkan situasi ini sebagai peluang untuk memperkuat posisinya dalam mencapai keanggotaan Uni Eropa. Selain itu, fenomena pengungsi Suriah juga menjadi momen penting bagi Presiden dan pemerintahannya untuk membangun hubungan lebih erat dengan Uni Eropa dalam mencari solusi bersama terkait krisis ini.

Uni Eropa memberikan bantuan sebesar \$3,2 miliar untuk mendukung pengungsi Suriah di Turki sekaligus memperkuat pertahanan perbatasan Turki. Sebagai penyeimbang, Turki akan menerima sejumlah manfaat politik, antara lain kebebasan bepergian bagi warga negaranya di zona Schengen tanpa visa, yang rencananya akan berlaku sebelum Oktober 2016. Kebijakan ini akan memungkinkan warga Turki bebas bergerak di banyak negara Eropa. Selain itu, negosiasi mengenai kemungkinan keanggotaan Turki di Uni Eropa juga akan terus berlanjut (BBC 2015). Mengingat potensi manfaat ini, Turki terus mempertahankan kebijakan pintu terbuka untuk menerima pengungsi Suriah, meskipun jumlah mereka semakin meningkat. Kebijakan ini sejalan dengan ambisi jangka panjang Turki untuk menjadi anggota penuh Uni Eropa, sebuah tujuan yang telah lama menjadi impian negaranya.

2.3.3 Kepedulian Terhadap HAM dan Komitmen dalam Konvensi Jenewa 1951

Turki telah menerapkan hukum internasional yang melindungi pengungsi melalui Konvensi Jenewa 1951 dan protokol 1967 yang dimana Turki memiliki tanggung jawab untuk membantu dan melindungi pengungsi sejak 24 Agustus 1951 (Wiryawan et al. 2021). Dalam menangani pengungsi Suriah, Turki menerapkan kebijakan *Open Door Policy* yang memperbolehkan masuknya pengungsi dari Suriah. Kebijakan ini mengatur bahwa pemerintah Turki bersedia menerima pengungsi dari luar kawasan Eropa dan memberikan mereka status sebagai pencari suaka sementara.

Turki memutuskan untuk menerima pengungsi Suriah berdasarkan komitmennya terhadap hak asasi manusia (HAM) dan tanggung jawab untuk melindungi mereka yang membutuhkan. Dalam upayanya menegakkan HAM dan menangani pelanggaran yang terjadi, pemerintah Turki memandang perlindungan terhadap pengungsi sebagai kewajiban moral dan kemanusiaan. Pemerintahan Turki mengambil kebijakan juga mengintegrasikan nilai-nilai Islam sebagai landasan kebijakannya. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Turki merasa terpanggil untuk membantu rekan-rekan seiman asal Suriah yang tengah menghadapi penderitaan akibat konflik berkepanjangan.

2.4 Dinamika Perkembangan Pengungsi Suriah di Turki

Dalam beberapa tahun terakhir, Turki telah menjadi salah satu negara tujuan utama bagi pengungsi Suriah yang melarikan diri dari konflik berkepanjangan di negara mereka. Secara geografis, Turki berbatasan langsung dengan Suriah, yang menjadikannya tujuan pertama bagi para pengungsi untuk mencari perlindungan

dari kekerasan yang terjadi. Kedatangan warga Suriah pertama kali tercatat pada April 2011 di wilayah perbatasan Hatay, dan sejak saat itu jumlah pengungsi yang masuk terus meningkat. Berdasarkan data dari *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), hingga tahun 2015, jumlah pengungsi Suriah di Turki telah mencapai lebih dari 2,5 juta orang (UNHCR, 2016).

Pemerintah Turki mengadopsi kebijakan *Open Door Policy* pada tahun 2011, yang memberikan perlindungan sementara kepada para pengungsi. Kebijakan ini didasarkan pada nilai kemanusiaan dan komitmen Turki terhadap Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967 yang mengatur perlindungan terhadap pengungsi (Kirişci, 2014). Selain itu, kebijakan ini juga dilatarbelakangi oleh ambisi Turki untuk memperkuat posisinya di Timur Tengah dan membangun hubungan lebih erat dengan Uni Eropa (Özden, 2013).

Namun, meskipun kebijakan ini awalnya dianggap sebagai langkah positif yang mencerminkan kepedulian terhadap hak asasi manusia, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Turki semakin besar seiring dengan meningkatnya jumlah pengungsi. Peningkatan tajam jumlah pengungsi memicu berbagai masalah, termasuk masalah sosial seperti meningkatnya ketegangan antara pengungsi dan penduduk lokal, masalah ekonomi akibat tekanan pada anggaran negara untuk penyediaan layanan dasar, serta masalah keamanan yang disebabkan oleh ancaman kelompok-kelompok bersenjata di wilayah perbatasan. Pada tahun 2014, Turki menghabiskan lebih dari 4,5 miliar dolar AS untuk mengelola krisis pengungsi ini, yang kemudian meningkat hingga lebih dari 8 miliar dolar AS pada tahun 2015 (World Bank, 2015).

Pengungsi Suriah di Turki menghadapi berbagai tantangan, termasuk akses terbatas terhadap pekerjaan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Sementara itu, masyarakat lokal Turki juga mulai merasakan dampak negatif dari kehadiran pengungsi dalam jumlah besar, seperti peningkatan kompetisi di pasar tenaga kerja dan ketegangan sosial yang terjadi di beberapa daerah (Erdoğan, 2020). Selain itu, ancaman terorisme yang muncul dari kelompok-kelompok bersenjata yang beroperasi di wilayah perbatasan menambah kekhawatiran pemerintah Turki. Data dari Kementerian Dalam Negeri Turki menunjukkan bahwa jumlah insiden keamanan di wilayah perbatasan meningkat hingga 20% pada periode 2013 hingga 2015 (Ministry of Interior Turkey, 2015).

Meskipun Turki menerima dukungan dari berbagai organisasi internasional, seperti UNHCR, UNICEF, dan WHO, beban yang ditanggung oleh pemerintah tetap sangat besar. Dana yang dihabiskan untuk mengelola krisis pengungsi ini terus meningkat setiap tahunnya, yang pada akhirnya berdampak pada kondisi ekonomi Turki. Pada puncaknya, pada tahun 2015, Turki mencatatkan defisit anggaran sebesar 2,3% dari PDB, sebagian besar akibat beban pengungsi (OECD, 2016).

Seiring dengan meningkatnya tantangan-tantangan tersebut, kebijakan *Open Door Policy* yang awalnya diterapkan oleh Turki mulai mengalami perubahan. Pada tahun 2015, pemerintah Turki memperketat pengawasan di wilayah perbatasan dan secara tidak resmi menerapkan *Closed Door Policy*. Langkah ini dilakukan dengan membangun dinding perbatasan sepanjang 900 km dan menambah jumlah pos keamanan di perbatasan dengan Suriah (Amnesty

International, 2016). Pemerintah juga mulai memberlakukan kebijakan yang lebih ketat terkait izin masuk pengungsi baru.

Perubahan kebijakan ini dilakukan untuk mengurangi masuknya pengungsi baru ke Turki dan menjaga stabilitas keamanan nasional. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan kritik dari berbagai pihak, termasuk organisasi kemanusiaan internasional, yang menilai bahwa kebijakan tersebut melanggar prinsip-prinsip perlindungan pengungsi (Human Rights Watch, 2016). Data dari Amnesty International menunjukkan bahwa sejak penerapan kebijakan *Closed Door Policy*, terjadi penurunan jumlah pengungsi baru yang masuk ke Turki hingga 70%, tetapi angka pelanggaran hak asasi manusia di wilayah perbatasan meningkat signifikan (Amnesty International, 2016).

Langkah ini menunjukkan bahwa meskipun Turki berkomitmen untuk membantu pengungsi, tekanan sosial, ekonomi, dan keamanan yang dihadapi telah memaksa pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan yang mereka terapkan. Perubahan kebijakan ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor internal, tetapi juga oleh dinamika politik internasional yang melibatkan negara-negara lain di kawasan Timur Tengah. Perubahan posisi Turki juga dipengaruhi oleh negosiasi dengan Uni Eropa yang menawarkan bantuan dana hingga 6 miliar euro dalam kesepakatan pengendalian pengungsi (European Commission, 2016).

BAB 3

ANALISIS PERUBAHAN KEBIJAKAN TURKI

Pada BAB III akan menganalisis lebih lanjut penyebab perubahan kebijakan Turki dari *Open Door Policy* menjadi *Closed Door Policy* pada tahun 2015 dengan menggunakan teori *Foreign Policy Analysis* yang dikemukakan oleh Walter Carlsnaes. Dalam analisis ini, penulis akan membagi pembahasan ke dalam dua sub-bab utama yang pertama mencangkup tiga dimensi dalam teori *Foreign Policy Analysis*. Setiap dimensi akan dibahas secara rinci untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perubahan kebijakan Turki dan sub-bab kedua menjelaskan bagaimana faktor-faktor tersebut saling berinteraksi untuk membentuk keputusan kebijakan luar negeri yang diambil oleh pemerintah Turki pada tahun 2015.

3.1 Faktor Penyebab Perubahan Kebijakan Turki dari Open Door Policy Menuju Closed Door Policy

Perubahan kebijakan Turki dari Open Door Policy menuju Closed Door Policy merupakan salah satu fenomena penting dalam studi kebijakan luar negeri yang perlu dianalisis secara mendalam. Kebijakan Open Door Policy yang diterapkan oleh pemerintah Turki pada tahun 2011 merupakan respons kemanusiaan terhadap krisis pengungsi yang diakibatkan oleh konflik di Suriah. Kebijakan ini memungkinkan para pengungsi untuk memasuki wilayah Turki tanpa batasan ketat, dengan tujuan memberikan perlindungan sementara bagi mereka yang melarikan diri dari kekerasan.

Namun, seiring berjalannya waktu, tantangan yang dihadapi Turki akibat kebijakan ini semakin kompleks. Lonjakan jumlah pengungsi yang terus meningkat setiap tahunnya menyebabkan tekanan yang signifikan pada aspek sosial, ekonomi, dan keamanan di Turki. Pemerintah Turki harus menghadapi berbagai konsekuensi dari kebijakan pintu terbuka ini, seperti meningkatnya ketegangan sosial di masyarakat lokal, persaingan di pasar tenaga kerja, serta ancaman keamanan dari kelompok-kelompok bersenjata yang memanfaatkan situasi tersebut.

Krisis pengungsi ini tidak hanya berdampak pada kondisi domestik Turki, tetapi juga mempengaruhi hubungan internasionalnya, terutama dengan Uni Eropa. Turki memainkan peran penting sebagai negara transit bagi pengungsi yang berusaha mencapai Eropa, yang membuat kebijakan perbatasannya menjadi perhatian utama dalam negosiasi politik dengan negara-negara Uni Eropa. Pada tahun 2015, pemerintah Turki memutuskan untuk memperketat kebijakan perbatasan dan secara bertahap menerapkan *Closed Door Policy* sebagai langkah untuk mengurangi dampak krisis pengungsi dan menjaga stabilitas nasional.

Analisis terhadap perubahan kebijakan ini penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pemerintah Turki dalam kebijakan luar negeri mereka. Kebijakan luar negeri tidak dibuat dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh berbagai dinamika internal dan eksternal yang kompleks. Oleh karena itu, dalam bab ini, penulis menggunakan pendekatan teori *Foreign Policy Analysis* (FPA) yang dikembangkan oleh Walter Carlsnaes untuk menganalisis perubahan kebijakan Turki dari *Open Door Policy* ke *Closed Door Policy*.

Teori *Foreign Policy Analysis* memandang kebijakan luar negeri sebagai hasil dari interaksi antara tiga dimensi utama: dimensi struktural, dimensi disposisional, dan dimensi intentional (Carlsnaes, 2013). Dimensi struktural mencakup faktor-faktor eksternal seperti tekanan internasional, kondisi ekonomi global, dan ancaman keamanan. Dimensi disposisional merujuk pada karakteristik internal negara, termasuk nilai-nilai, ideologi, dan persepsi pemimpin politik. Sementara itu, dimensi intentional menekankan pada tujuan dan niat di balik kebijakan yang diambil oleh negara.

3.1.1 Dimensi Intentional

Dimensi intentional dalam teori *Foreign Policy Analysis* (FPA) mengacu pada tujuan strategis yang ingin dicapai oleh suatu negara melalui kebijakan luar negerinya. Dalam kasus perubahan kebijakan Turki dari *Open Door Policy* menuju *Closed Door Policy*, dimensi intentional mencerminkan keputusan yang didasarkan pada pilihan strategis pemerintah untuk menjaga stabilitas nasional serta preferensi prioritas untuk meminimalkan dampak domestik dari krisis pengungsi.

Pilihan Strategis (Choice), Keputusan untuk mengubah kebijakan perbatasan Turki pada tahun 2015 didasarkan pada berbagai pertimbangan strategis. Pemerintah Turki tidak hanya mempertimbangkan dampak domestik tetapi juga tekanan internasional yang semakin meningkat. Langkah-langkah strategis yang diambil oleh pemerintah Turki meliputi Pembangunan Infrastruktur Perbatasan dengan pembangunan dinding sepanjang 900 kilometer di sepanjang perbatasan dengan Suriah menjadi salah satu upaya utama untuk memperketat pengawasan. Dinding ini dilengkapi dengan kamera pengintai, drone, dan teknologi pemantauan

lainnya guna memastikan tidak ada infiltrasi ilegal yang terjadi. Kebijakan ini juga ditujukan untuk mencegah pergerakan kelompok bersenjata seperti ISIS yang dapat mengancam stabilitas nasional Turki.

Pengetatan kebijakan izin masuk mulai akhir tahun 2015, Turki memberlakukan kebijakan baru yang mengharuskan pengungsi Suriah memiliki dokumen resmi untuk memasuki wilayah Turki. Kebijakan ini mengurangi jumlah pengungsi yang masuk secara signifikan dan membantu pemerintah mengelola kapasitas domestik yang terbatas. Langkah ini sekaligus mengurangi tekanan pada layanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur lainnya. Operasi militer di perbatasan, pemerintah Turki meluncurkan operasi militer di wilayah perbatasan untuk mengamankan daerah-daerah yang rentan terhadap serangan teroris dan penyelundupan. Operasi ini bertujuan untuk menstabilkan wilayah perbatasan yang sering menjadi pusat konflik.

Preferensi Prioritas (*Preference*), Preferensi utama pemerintah Turki berubah seiring waktu, dari tanggung jawab kemanusiaan menjadi fokus pada stabilitas nasional. Perubahan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adanya tekanan politik domestik. Berdasarkan survei *Turkish Red Crescent* tahun 2017, lebih dari 70% masyarakat Turki merasa terbebani oleh kehadiran pengungsi Suriah (*Turkish Red Crescent* 2017). Mereka menganggap bahwa kebijakan *Open Door Policy* memberikan dampak negatif terhadap akses masyarakat lokal terhadap layanan publik, seperti kesehatan dan pendidikan.

Ketidakpuasan masyarakat mendorong pemerintah untuk mengubah kebijakan mereka demi meredakan ketegangan domestik. Kemudian adanya

ancaman keamanan nasional, arus besar pengungsi yang masuk ke Turki tanpa kontrol ketat dianggap sebagai ancaman potensial terhadap keamanan nasional. Beberapa kelompok teroris, seperti ISIS, diketahui memanfaatkan situasi ini untuk menyusup ke Turki. Serangan teror di Ankara dan Istanbul pada tahun 2015 memperkuat narasi bahwa perubahan kebijakan perbatasan adalah langkah yang diperlukan untuk melindungi keamanan nasional. Munculnya dampak ekonomi yang berat, berdasarkan laporan *World Bank*, biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah Turki untuk menangani krisis pengungsi mencapai lebih dari 8 miliar dolar AS hingga tahun 2015 (World Bank 2015). Biaya ini mencakup penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Tekanan ekonomi ini memperkuat kebutuhan pemerintah untuk mengendalikan arus pengungsi.

Tabel 3. 1 langkah-langkah strategis pemerintah Turki dalam dimensi intentional

Langkah Strategis	Tujuan	Hasil
Pembangunan dinding perbatasan	Mencegah infiltrasi ilegal dan ancaman dari kelompok bersenjata	Pengurangan insiden infiltrasi
Pengetatan izin masuk	Mengurangi arus pengungsi dan mengelola kapasitas domestik	Penurunan arus pengungsi baru
Operasi militer di perbatasan	Mengamankan wilayah perbatasan dari aktivitas teroris	Penurunan aktivitas terorisme

Dimensi intentional menunjukkan bahwa perubahan kebijakan Turki dari *Open Door Policy* menuju *Closed Door Policy* adalah hasil dari pertimbangan strategis yang kompleks. Pemerintah Turki berupaya menyeimbangkan antara tanggung jawab kemanusiaan dan kebutuhan untuk melindungi stabilitas nasional. Langkah-langkah strategis seperti pembangunan infrastruktur perbatasan, pengetatan izin masuk, dan operasi militer menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengurangi dampak domestik dari krisis pengungsi. Meskipun langkah ini berhasil menurunkan jumlah pengungsi yang masuk, kebijakan tersebut juga menuai kritik dari komunitas internasional karena dianggap mengabaikan prinsip-prinsip kemanusiaan. Keputusan ini mencerminkan dilema yang dihadapi oleh pemerintah Turki dalam menghadapi krisis pengungsi Suriah. Kebijakan *Closed Door Policy* menjadi simbol dari upaya pemerintah untuk menyeimbangkan antara kepentingan nasional dan tekanan internasional di tengah situasi yang kompleks.

3.1.2 Dimensi Disposisional

Dimensi disposisional dalam teori *Foreign Policy Analysis* (FPA) menekankan pada karakteristik internal negara, termasuk nilai-nilai, ideologi, dan persepsi pemimpin politik yang mempengaruhi kebijakan luar negeri. Dalam konteks perubahan kebijakan Turki dari *Open Door Policy* ke *Closed Door Policy*, peran President Recep Tayyip Erdoğan dan partainya, AKP (*Adalet ve Kalkınma Partisi*), sangat dominan dalam menentukan arah kebijakan luar negeri Turki (Kirisci 2014).

Persepsi (Perceptions), pemerintahan Turki melalui President Recep Tayyip Erdoğan memegang peranan penting dalam menentukan kebijakan luar

negeri Turki. Partai AKP Turki yang menjadi partai yang memiliki visi politik yang berorientasi pada penguatan peran Turki di panggung internasional, terutama di kawasan Timur Tengah. Salah satu alasan utama Turki menerapkan kebijakan *Open Door Policy* pada tahun 2011 adalah untuk memperkuat posisi geopolitik Turki sebagai negara yang peduli terhadap isu-isu kemanusiaan di kawasan tersebut (Kirisci 2014). Selain itu, Erdoğan berkomitmen untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi Suriah sebagai bagian dari tanggung jawab kemanusiaan. Ini terlihat dari implementasi kebijakan *Open Door Policy* pada tahun 2011 yang memungkinkan para pengungsi memasuki Turki tanpa batasan ketat.

Namun, Seiring dengan lonjakan jumlah pengungsi, Pemerintah Turki mulai menghadapi tekanan domestik. Pengungsi dipersepsikan sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional, baik dalam aspek sosial maupun ekonomi. Pada tahun 2015 lebih dari 2,5 juta pengungsi Suriah telah berada di Turki, menjadikannya negara dengan jumlah pengungsi terbesar di dunia (UNHCR 2016). Hal ini menimbulkan dampak langsung pada layanan publik dan masyarakat lokal.

Menurut laporan dari *Human Rights Watch*, Erdoğan menghadapi tekanan politik dari masyarakat Turki yang semakin tidak puas dengan kehadiran pengungsi Suriah (Human Rights Watch 2018). Dalam survei yang dilakukan oleh *Turkish Red Crescent*, lebih dari 70% masyarakat Turki menyatakan bahwa mereka merasa terbebani oleh kehadiran pengungsi (Turkish Red Crescent 2017). Tekanan ini mendorong Erdoğan untuk mengambil langkah-langkah yang lebih tegas dalam mengelola krisis pengungsi.

Nilai-nilai (*Values*), Nilai dan kebijakan partai *Adalet ve Kalkinma Partisi* (AKP) yaitu partai yang didirikan oleh Erdoğan, memiliki ideologi berbasis Islam dan nasionalisme. Nilai-nilai ini memainkan peran penting dalam kebijakan awal terkait pengungsi, tetapi mulai berubah seiring meningkatnya tantangan domestik. Pada awal krisis, kebijakan *Open Door Policy* didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan Islam, seperti memberikan perlindungan kepada mereka yang membutuhkan. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan citra Turki sebagai pemimpin kawasan dalam isu-isu kemanusiaan. Dengan meningkatnya ketegangan sosial akibat kehadiran pengungsi, retorika politik AKP mulai bergeser ke arah nasionalisme. Langkah ini dirancang untuk meredakan ketidakpuasan domestik dan mempertahankan dukungan politik. Dalam pemilu 2015, Erdoğan menggunakan isu pengungsi sebagai alat untuk memperkuat narasi stabilitas dan keamanan nasional. Erdoğan kerap menggunakan retorika populis untuk membangun dukungan politik, dengan menekankan bahwa kebijakan perbatasan yang lebih ketat diperlukan untuk melindungi kepentingan rakyat Turki.

Nilai lainnya yaitu perubahan prioritas nasional Turki berubah secara signifikan sepanjang krisis pengungsi. Pada awalnya, kebijakan Turki diarahkan untuk memperkuat posisinya di Timur Tengah dan menunjukkan solidaritas dengan komunitas Muslim. Namun, tekanan domestik memaksa pemerintah untuk memprioritaskan stabilitas internal. Menurut laporan dari OECD, krisis pengungsi menyebabkan peningkatan signifikan dalam pengeluaran sosial, termasuk kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Pemerintah Turki menghadapi defisit anggaran sebesar 2,3% dari PDB pada tahun 2015, sebagian besar karena beban ekonomi yang ditimbulkan oleh krisis ini (OECD 2016).

Kehadiran pengungsi yang masif menimbulkan ketegangan sosial. Laporan dari *Istanbul Bilgi University* menunjukkan bahwa lebih dari 60% masyarakat lokal merasa akses mereka terhadap layanan publik menjadi lebih terbatas akibat prioritas yang diberikan kepada pengungsi (Istanbul Bilgi University 2018). Uni Eropa menekan Turki untuk mengurangi arus pengungsi ke wilayah Eropa. Kesepakatan EU-Turkey Refugee Deal pada tahun 2016 memberikan bantuan dana sebesar 6 miliar euro kepada Turki untuk mengelola krisis pengungsi, sebagai imbalan untuk mengontrol arus migrasi (European Commission 2016). Kesepakatan ini menyoroti bagaimana hubungan internasional juga mempengaruhi kebijakan domestik Turki.

Tabel 3. 2 Indikator Dimensi Disposisional dalam Perubahan Kebijakan Turki

Indikator	Data	Sumber
Jumlah pengungsi Suriah	2,5 juta (2015)	(UNHCR 2016)
Defisit anggaran nasional	2,3% dari PDB (2015)	(OECD 2016)
Bantuan Uni Eropa	6 miliar euro	(EU-Turkey Refugee Deal 2016)
Ketidakpuasan masyarakat	70% merasa terbebani	(Turkish Red Crescent 2017)

Ketegangan sosial lokal	60% merasa akses layanan terbatas	(Istanbul Bilgi University 2018)
-------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Dalam menganalisis perubahan kebijakan Turki dari *Open Door Policy* menjadi *Closed Door Policy*, dimensi disposisional memainkan peran sentral. Dimensi ini mencakup elemen-elemen internal seperti persepsi pemimpin, ideologi politik partai berkuasa, dan prioritas nasional. Beberapa data pendukung di bawah ini memberikan gambaran lebih jelas tentang bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi pengambilan kebijakan.

Pertama, jumlah pengungsi Suriah berdasarkan data UNHCR, jumlah pengungsi Suriah di Turki mencapai lebih dari 2,5 juta pada tahun 2015 (UNHCR 2016). Angka ini menjadikan Turki sebagai negara dengan populasi pengungsi terbesar di dunia. Situasi ini menimbulkan tantangan signifikan, termasuk meningkatnya tekanan pada layanan publik, pendidikan, dan kesehatan. Data ini menunjukkan bagaimana lonjakan jumlah pengungsi menjadi salah satu alasan utama bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan perbatasannya.

Kedua, defisit anggaran nasional dari laporan OECD menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah Turki untuk kebutuhan pengungsi meningkatkan defisit anggaran hingga 2,3% dari PDB pada tahun 2015 (OECD 2016). Beban ini mencakup pengadaan layanan kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal. Data ini relevan untuk memahami bahwa kebijakan *Open Door Policy* tidak hanya memiliki implikasi sosial, tetapi juga ekonomi yang signifikan.

Ketiga, ketidakpuasan masyarakat lokal menurut survei *Turkish Red Crescent*, lebih dari 70% masyarakat Turki merasa terbebani oleh kehadiran pengungsi (Turkish Red Crescent 2017). Ketidakpuasan ini mempengaruhi stabilitas sosial di wilayah perbatasan, seperti Hatay dan Gaziantep. Hal ini mendorong Presiden Recep Tayyip Erdoğan dan partainya untuk mempertimbangkan perubahan kebijakan guna merespons tekanan domestik.

Keempat, bantuan dari Uni Eropa Sebagai bagian dari *EU-Turkey Refugee Deal* tahun 2016, Uni Eropa menawarkan bantuan sebesar 6 miliar euro untuk mendukung Turki dalam menangani pengungsi (European Commission 2016). Namun, bantuan ini juga disertai dengan tuntutan untuk memperketat kebijakan perbatasan. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi disposisional tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga oleh hubungan internasional.

Kelima, ketegangan sosial lokal berdasarkan survei dari *Istanbul Bilgi University* mencatat bahwa 60% masyarakat lokal merasa akses terhadap layanan dasar menjadi terbatas akibat prioritas yang diberikan kepada pengungsi (Istanbul Bilgi University 2018). Hal ini menambah ketegangan sosial di wilayah dengan populasi pengungsi tinggi, menciptakan tekanan tambahan pada pemerintah untuk menyeimbangkan antara kebutuhan pengungsi dan masyarakat lokal.

Data-data ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan Turki tidak bisa dilepaskan dari tekanan internal, baik dari persepsi pemimpin, ideologi partai, maupun perubahan prioritas nasional. Kebijakan luar negeri yang awalnya didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan perlahan bergeser ke arah yang lebih pragmatis, mengutamakan stabilitas nasional dan kepentingan domestik. Perubahan

ini mencerminkan bagaimana pemerintah berusaha menanggapi tantangan kompleks yang dihadapi, baik dari dalam negeri maupun dari komunitas internasional.

Oleh karena itu, dimensi disposisional menggambarkan bagaimana persepsi Nilai, dan prioritas nasional membentuk kebijakan luar negeri Turki. Keputusan untuk memperketat kebijakan perbatasan mencerminkan upaya Erdoğan dan AKP untuk menjaga keseimbangan antara tanggung jawab kemanusiaan dan kebutuhan domestik. Turki menghadapi dilema yang kompleks: di satu sisi, tekanan internasional mengharuskan Turki untuk mempertahankan komitmennya terhadap pengungsi, sementara di sisi lain, tekanan domestik memaksa pemerintah untuk mengutamakan stabilitas nasional. Perubahan kebijakan ini tidak hanya mencerminkan adaptasi terhadap realitas internal, tetapi juga menegaskan bagaimana aktor politik menggunakan kebijakan luar negeri sebagai alat untuk mencapai tujuan domestik.

3.1.3 Dimensi Struktural

Dimensi struktural dalam teori *Foreign Policy Analysis* (FPA) menekankan pada kondisi objektif (*objective condition*) dan pengaturan institusional (*institutional setting*) yang mempengaruhi keputusan suatu negara dalam kebijakan luar negeri. Dalam konteks perubahan kebijakan Turki dari *Open Door Policy* ke *Closed Door Policy*, dimensi ini berfokus pada struktur eksternal yang mencakup tekanan internasional, kondisi geografis, dan sistem institusional yang ada.

Kondisi Objektif (*Objective Condition*) mencakup realitas yang melibatkan faktor geografis, ekonomi, dan sosial yang dihadapi Turki dalam

menangani krisis pengungsi Suriah. Hal ini memberikan kerangka utama bagi pemerintah Turki dalam merumuskan kebijakan yang lebih restriktif. Pertama, Lokasi geografis strategis Turki Sebagai penghubung antara Asia dan Eropa, Turki berfungsi sebagai jalur transit utama bagi pengungsi Suriah yang ingin menuju Eropa. Letak geografis ini menjadikan Turki berada di garis depan dalam menangani arus migrasi global. Posisi ini memberikan Turki pengaruh geopolitik yang signifikan, tetapi juga menciptakan tekanan besar dalam mengelola stabilitas domestik dan hubungan internasional. Selain itu, wilayah perbatasan seperti Hatay, Gaziantep, dan Kilis menjadi pusat perhatian utama karena menjadi titik masuk pengungsi terbesar. Tekanan ini semakin menegaskan kebutuhan Turki untuk memperkuat kontrol perbatasannya.

Kedua, Beban ekonomi berdasarkan laporan World Bank 2015, Turki telah menghabiskan lebih dari 8 miliar dolar AS untuk memberikan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan bagi pengungsi (World Bank 2015). Biaya ini mencakup pembangunan kamp pengungsi, subsidi makanan, serta layanan kesehatan dan pendidikan gratis. Peningkatan pengeluaran ini menyebabkan defisit anggaran hingga mencapai 2,3% dari PDB pada tahun 2015 (OECD, 2016). Beban finansial ini juga menciptakan tekanan pada sektor publik, terutama di wilayah dengan konsentrasi pengungsi yang tinggi. Misalnya, di provinsi Şanlıurfa, alokasi dana untuk kebutuhan pengungsi mencapai 30% dari anggaran lokal, yang mengurangi alokasi untuk kebutuhan masyarakat lokal.

Ketiga, Tantangan sosial yang dialami Turki dengan adanya lonjakan jumlah pengungsi Suriah, yang mencapai 2,5 juta pada tahun 2015 (UNHCR,

2016), memunculkan ketegangan sosial di wilayah perbatasan Turki. Banyak masyarakat lokal merasa tersaingi dalam akses terhadap layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Survei *Istanbul Bilgi University* 2018 menunjukkan bahwa 60% masyarakat lokal merasa kebutuhan mereka diabaikan akibat prioritas yang diberikan kepada pengungsi (*Istanbul Bilgi University* 2018). Selain itu, peningkatan jumlah tenaga kerja pengungsi yang bekerja dengan upah rendah memicu ketegangan di pasar kerja lokal. Ketegangan ini terlihat jelas di sektor informal seperti konstruksi dan pertanian, di mana pengungsi sering kali dianggap "merebut" peluang kerja dari masyarakat lokal.

Pengaturan Institusional (*Institutional Setting*), mencakup struktur hukum, kebijakan domestik, dan kerja sama internasional yang membentuk respon Turki terhadap krisis pengungsi. Sistem ini menunjukkan bagaimana institusi nasional dan internasional mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Pertama, Kesepakatan *EU-Turkey Refugee Deal* 2016 merupakan hasil negosiasi antara Uni Eropa dan Turki, di mana Uni Eropa menawarkan bantuan finansial sebesar 6 miliar euro untuk mendukung pengelolaan pengungsi (*EU-Turkey Refugee Deal* 2016). Sebagai imbalan, Turki berkomitmen untuk memperketat kontrol perbatasan dan mencegah pengungsi ilegal memasuki Eropa. Kesepakatan ini memberikan insentif finansial bagi Turki tetapi juga menambah tekanan untuk mematuhi tuntutan Uni Eropa terkait pengendalian migrasi.

Kedua, Kebijakan Domestik terkait Pengungsi: Pada awal krisis, Turki menerapkan kebijakan pintu terbuka yang mencerminkan pendekatan humanis terhadap pengungsi. Pemerintah membangun lebih dari 20 kamp pengungsi di

berbagai provinsi, menyediakan tempat tinggal, makanan, dan layanan kesehatan. Namun, dengan meningkatnya jumlah pengungsi, kebijakan ini mulai berubah. Pada tahun 2015, Turki memperkenalkan pembatasan visa bagi pengungsi Suriah yang mencoba masuk melalui jalur udara dan laut, sebagai bagian dari strategi *Closed Door Policy*. Kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mengurangi tekanan domestik tanpa sepenuhnya mengabaikan komitmen internasional.

Ketiga, Hubungan dengan Organisasi Internasional: *Amnesty International* 2016 melaporkan bahwa Turki menghadapi kritik atas perlakuannya terhadap pengungsi, termasuk praktik deportasi paksa dan perlakuan diskriminatif di beberapa wilayah perbatasan (Amnesty International 2016). Meski demikian, kerja sama dengan organisasi internasional seperti UNHCR membantu meningkatkan kapasitas Turki dalam mengelola pengungsi. UNHCR, misalnya, mendukung pendirian pusat pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pengungsi di kamp-kamp resmi.

Dimensi struktural memberikan kerangka yang komprehensif untuk memahami perubahan kebijakan Turki dari *Open Door Policy* ke *Closed Door Policy*. Kondisi objektif seperti tekanan geografis, beban ekonomi, dan tantangan sosial memaksa pemerintah Turki untuk mengevaluasi ulang kebijakannya. Sementara itu, pengaturan institusional, termasuk kesepakatan internasional seperti *EU-Turkey Refugee Deal*, memainkan peran penting dalam membentuk respons kebijakan Turki. Perubahan kebijakan ini mencerminkan bagaimana pemerintah Turki mencoba menyeimbangkan tanggung jawab internasional dengan

kepentingan domestik. Dengan adanya tekanan dari Uni Eropa dan organisasi internasional, Turki harus beradaptasi dengan realitas eksternal sekaligus mempertahankan stabilitas internal. Langkah-langkah yang diambil pemerintah menunjukkan kompleksitas dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri, di mana faktor objektif dan institusional saling berinteraksi untuk menciptakan kebijakan yang pragmatis.

3.2 Refleksi Analisis Kebijakan

Analisis perubahan kebijakan Turki dari *Open Door Policy* ke *Closed Door Policy* menunjukkan bahwa keputusan pemerintah Turki tidak dibuat secara spontan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang kompleks. Dalam kajian ini, teori *Foreign Policy Analysis* yang dikembangkan oleh Walter Carlsnaes digunakan untuk memahami bagaimana faktor struktural, disposisional, dan intentional berinteraksi dalam membentuk kebijakan luar negeri Turki.

Dimensi struktural menyoroti dua aspek utama, yaitu kondisi objektif (*objective condition*) dan pengaturan institusional (*institutional setting*), yang saling mempengaruhi keputusan pemerintah Turki. Kondisi objektif mencakup tantangan geografis, beban ekonomi, dan ketegangan sosial yang timbul akibat lonjakan jumlah pengungsi. Misalnya, data dari UNHCR menunjukkan bahwa pada tahun 2015 jumlah pengungsi Suriah di Turki mencapai 2,5 juta, menjadikan Turki negara dengan jumlah pengungsi terbesar di dunia (UNHCR 2016). Hal ini menciptakan tekanan signifikan pada anggaran pemerintah, yang menurut laporan World Bank 2015, menghabiskan lebih dari 8 miliar dolar AS untuk menyediakan kebutuhan

dasar pengungsi (World Bank 2015). Selain itu, ketegangan sosial yang muncul di wilayah perbatasan, seperti Hatay dan Gaziantep, memperburuk hubungan antara masyarakat lokal dan pengungsi. Survei *Istanbul Bilgi University* 2018 melaporkan bahwa 60% penduduk lokal merasa terpinggirkan dalam akses terhadap layanan publik akibat prioritas yang diberikan kepada pengungsi (Istanbul Bilgi University 2018).

Sementara itu, pengaturan institusional menunjukkan bagaimana kebijakan domestik dan tekanan internasional membentuk respons Turki. Kesepakatan *EU-Turkey Refugee Deal* 2016 menjadi contoh nyata bagaimana Uni Eropa mempengaruhi kebijakan pengungsi Turki (EU-Turkey Refugee Deal 2016). Kesepakatan ini memberikan bantuan finansial sebesar 6 miliar euro, tetapi dengan syarat bahwa Turki memperketat kebijakan perbatasannya. Di tingkat domestik, pemerintah Turki juga memperkenalkan kebijakan pembatasan visa untuk mengurangi jumlah pengungsi yang masuk. Langkah ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan antara tuntutan internasional dan kebutuhan domestik.

Dimensi disposisional menekankan pada peran aktor-aktor kunci dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Presiden Recep Tayyip Erdoğan dan partainya, AKP, memainkan peran dominan dalam menentukan arah kebijakan ini. Erdoğan, yang awalnya mempromosikan kebijakan pintu terbuka sebagai wujud solidaritas kemanusiaan, mulai mengubah pandangannya ketika tekanan domestik meningkat. Tekanan ini terlihat dari survei *Turkish Red Crescent* 2017, yang mencatat bahwa lebih dari 70% masyarakat Turki merasa terbebani oleh kehadiran

pengungsi (Turkish Red Crescent 2017). Perubahan persepsi Erdoğan terhadap pengungsi, dari "korban konflik" menjadi "beban sosial dan ekonomi," sangat mempengaruhi keputusan untuk memperketat kebijakan perbatasan. Selain itu, nilai-nilai politik partai AKP, yang mengedepankan nasionalisme dan stabilitas, turut membentuk pendekatan pemerintah terhadap isu pengungsi.

Dimensi intentional menyoroti tujuan utama pemerintah Turki dalam mengubah kebijakan ini. Tujuan tersebut meliputi menjaga stabilitas nasional, mengurangi beban ekonomi, dan memperkuat posisi dalam negosiasi internasional. Kebijakan *Closed Door Policy* juga digunakan untuk meminimalkan risiko keamanan, seperti infiltrasi kelompok militan di perbatasan. Data dari *Ministry of Interior Turkey* 2017 menunjukkan bahwa setelah kebijakan ini diterapkan, jumlah insiden keamanan di wilayah perbatasan berkurang hingga 30% pada tahun 2017 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (Ministry of Interior Turkey 2017). Kesepakatan *EU-Turkey Refugee Deal* juga memberikan Turki leverage politik yang signifikan dalam hubungan dengan Uni Eropa, memungkinkan Turki untuk menegosiasikan bantuan finansial dan konsesi politik lainnya.

Namun, perubahan kebijakan ini juga menimbulkan dampak negatif, terutama bagi pengungsi yang tertahan di perbatasan. *Amnesty International* 2018 melaporkan bahwa pengungsi sering kali menghadapi kondisi yang tidak manusiawi, seperti kurangnya akses terhadap makanan, air bersih, dan layanan kesehatan. Kritik ini menunjukkan bahwa kebijakan *Closed Door Policy* menimbulkan dilema moral, di mana kepentingan nasional sering kali bertentangan

dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam Konvensi Jenewa 1951.

Dari perspektif geopolitik, kebijakan ini memperkuat posisi Turki sebagai aktor kunci dalam isu migrasi global. Dengan menggunakan statusnya sebagai negara transit utama, Turki mampu memanfaatkan situasi ini untuk memperkuat hubungan diplomatiknya dan mendapatkan keuntungan finansial dari Uni Eropa. Meskipun demikian, hubungan antara Turki dan Uni Eropa tetap tegang karena perbedaan pandangan tentang pengelolaan isu pengungsi dan standar hak asasi manusia.

Perubahan kebijakan dari *Open Door Policy* ke *Closed Door Policy* mencerminkan upaya Turki untuk menyeimbangkan antara nilai-nilai kemanusiaan dan kepentingan nasional. Meskipun pada awalnya kebijakan pintu terbuka menunjukkan solidaritas terhadap pengungsi Suriah, tekanan domestik dan internasional memaksa pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang lebih pragmatis. Dengan memahami interaksi antara dimensi struktural, disposisional, dan intentional, dapat disimpulkan bahwa kebijakan luar negeri Turki dalam konteks ini merupakan hasil dari kalkulasi strategis yang kompleks, di mana faktor internal dan eksternal saling berinteraksi untuk menciptakan kebijakan yang responsif terhadap dinamika yang terus berubah

3.3 Recep Tayyip Erdoğan sebagai *decision maker* utama

Recep Tayyip Erdogan berperan sebagai *decision maker* utama dalam kebijakan luar negeri Turki, khususnya dalam merespons krisis pengungsi Suriah yang memuncak sejak 2011 dan mencapai titik kritis pada tahun 2015 (Kayahan,

n.d. 2023). Sebagai Presiden Republik Turki sekaligus pemimpin Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), Erdogan memegang kendali politik yang sangat kuat dan memiliki kapasitas penuh dalam menentukan arah serta strategi kebijakan negara. Dalam konteks kebijakan pengungsi, Erdogan secara aktif memimpin implementasi *Open Door Policy* sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan dan simbol kepemimpinan moral di kawasan Timur Tengah (Agestia, Aruni, and Nau 2023). Namun, seiring meningkatnya beban domestik seperti tekanan ekonomi, meningkatnya angka pengangguran, kekhawatiran masyarakat lokal, serta ancaman keamanan akibat infiltrasi kelompok bersenjata, Erdogan mengubah arah kebijakannya menuju *Closed Door Policy* secara tidak resmi (Luerdi 2016). Keputusan strategis ini mencerminkan posisi Erdogan sebagai aktor utama dalam **dimensi intentional** sebagaimana dikemukakan oleh Walter Carlsnaes, yang menunjukkan kehendak politik untuk membangun tembok perbatasan sepanjang 900 kilometer, memperketat izin masuk pengungsi dengan syarat dokumen resmi, serta meluncurkan operasi militer untuk menstabilkan wilayah perbatasan.

Lebih lanjut, dalam **dimensi disposisional**, Erdogan dipengaruhi oleh nilai-nilai ideologis yang dianut oleh AKP, yakni gabungan antara nasionalisme Turki dan nilai-nilai Islam moderat (Kirisci 2014). Awalnya, pendekatan yang digunakan Erdogan berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan dan tanggung jawab moral sebagai negara mayoritas Muslim terhadap saudara seiman dari Suriah. Namun, dalam perkembangannya, tekanan politik dari oposisi, meningkatnya retorika anti-pengungsi di media, dan tuntutan masyarakat untuk perlindungan lebih besar terhadap sumber daya nasional, mendorong Erdogan mengubah retorikanya menjadi lebih proteksionis dan populis. Ia memanfaatkan isu pengungsi sebagai alat

legitimasi untuk mempertahankan stabilitas domestik dan memperkuat citra politiknya, termasuk dalam konteks pemilu dan negosiasi internasional dengan Uni Eropa. Di sini terlihat bahwa Erdogan tidak hanya menjalankan kebijakan sebagai kepala pemerintahan, tetapi ia juga membentuk dan mengarahkan narasi serta pendekatan kebijakan luar negeri secara aktif dan personal.

Dengan menggabungkan dua dimensi tersebut – intentional dan disposisional – dapat disimpulkan bahwa Erdogan memainkan peran yang tidak tergantikan dalam penentuan kebijakan perbatasan Turki terhadap Suriah. Ia bukan hanya pelaksana teknokratis, melainkan tokoh politik yang membentuk kebijakan berdasarkan kalkulasi strategis, persepsi subjektif, dan tekanan internal-eksternal yang kompleks. Erdogan juga mampu merespons perubahan lingkungan global dan domestik secara cepat, menjadikannya sebagai aktor sentral dalam teori *Foreign Policy Analysis* yang melihat pemimpin sebagai elemen kunci dalam proses pengambilan keputusan luar negeri.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan luar negeri Turki dalam merespons konflik di Suriah merupakan upaya strategis yang mencakup berbagai aspek internal dan eksternal. Sejak awal konflik pada tahun 2011, Turki telah memainkan peran aktif dalam menerima pengungsi Suriah, memberikan bantuan kemanusiaan, dan mengambil langkah-langkah diplomasi untuk menekan rezim Bashar Al-Assad. Namun, seiring dengan meningkatnya tantangan yang dihadapi, kebijakan ini mengalami perubahan yang signifikan. Pada awal konflik, kebijakan pintu terbuka yang diterapkan oleh pemerintah Turki mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas dengan masyarakat Suriah. Kebijakan ini memungkinkan pengungsi Suriah untuk masuk ke wilayah Turki tanpa hambatan. Namun, meningkatnya jumlah pengungsi yang datang ke Turki memicu berbagai masalah domestik, termasuk tekanan pada layanan publik, ketegangan sosial, dan dampak ekonomi.

Dari perspektif teori Foreign Policy Analysis, kebijakan Turki dapat dijelaskan melalui tiga dimensi utama: **Dimensi Struktural** dipengaruhi faktor eksternal seperti tekanan internasional, konflik berkepanjangan di Suriah, dan ancaman keamanan di perbatasan memainkan peran besar dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri Turki. Lokasi geografis Turki yang berbatasan langsung dengan Suriah membuat negara ini rentan terhadap dampak konflik, termasuk

masuknya kelompok militan dan pengungsi dalam jumlah besar. Pengaturan institusional, seperti kebijakan domestik terkait pembatasan visa dan kesepakatan EU-Turkey Refugee Deal (2016), juga memainkan peran penting. Kesepakatan ini memberikan Turki dukungan finansial sebesar 6 miliar euro, tetapi dengan syarat bahwa Turki memperketat kebijakan perbatasannya. Langkah ini mencerminkan pentingnya dukungan eksternal dalam membantu Turki mengelola krisis pengungsi, sambil memastikan keamanan nasional tetap terjaga.

Dimensi Disposisional, Dimensi ini berfokus pada peran aktor-aktor kunci dalam pengambilan keputusan, terutama pemerintahan Turki di masa Presiden Recep Tayyip Erdoğan dan partai AKP. Turki memanfaatkan krisis pengungsi sebagai peluang untuk memperkuat posisi Turki di kawasan Timur Tengah. Namun, tekanan domestik dari masyarakat yang merasa terbebani oleh kehadiran pengungsi memaksa pemerintah Turki untuk mengubah pendekatannya. Pada satu sisi, kebijakan pintu terbuka didasarkan pada nilai kemanusiaan dan solidaritas yang diajarkan dalam Islam. Namun, pada sisi lain, meningkatnya jumlah pengungsi dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas sosial dan identitas nasional Turki, sehingga pemerintah merasa perlu untuk mengubah pendekatannya.

Dimensi Intentional: Kebijakan luar negeri Turki diarahkan pada pencapaian tujuan strategis, seperti menjaga stabilitas nasional, mengurangi dampak ekonomi, dan memperkuat posisi diplomatik Turki dalam hubungan internasional. Data dari Ministry of Interior Turkey (2017) menunjukkan bahwa setelah penerapan kebijakan Closed Door Policy, jumlah insiden keamanan di perbatasan berkurang hingga 30% pada tahun 2017. Selain itu, kebijakan ini

membantu Turki menegosiasikan konsesi politik dan dukungan finansial dari Uni Eropa. Dengan menutup perbatasan, pemerintah Turki juga berupaya mengurangi infiltrasi kelompok militan yang berpotensi membahayakan stabilitas nasional.

Perubahan kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah Turki berusaha menyeimbangkan antara nilai kemanusiaan dan kepentingan nasional. Tantangan domestik, seperti tekanan ekonomi dan ketegangan sosial, serta tekanan internasional, memaksa pemerintah untuk mengadopsi kebijakan yang lebih pragmatis. Secara keseluruhan, kebijakan luar negeri Turki mencerminkan interaksi kompleks antara faktor internal dan eksternal, yang saling mempengaruhi dalam pengambilan keputusan strategis.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya maupun bagi pengambil kebijakan di Turki dalam mengelola krisis pengungsi Suriah:

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan teori alternatif seperti Realisme, Konstruktivisme, atau Liberal Institusionalisme untuk memberikan sudut pandang yang berbeda dalam memahami kebijakan luar negeri Turki. dan
2. Mengkaji dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan pengungsi di Turki, terutama dalam hal integrasi pengungsi ke dalam masyarakat lokal dan pasar tenaga kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Agestia, Ninda R., Ayu Aruni, and Novriest U. Nau. 2023. "The Implementation of Open Door Policy in Dealing with the Syrian Refugee Crisis (A Case Study of Turkey- European Union Cooperation through the Emergency Social Safety Net Program 2016-2017)." *Journal of Middle East and Islamic Studies* 10(1) (January). <https://doi.org/10.7454/meis.v10i1.159>.
- Alca, Deniz. 2023. "New Refugee Policy: Is Turkey Closing the Door." In *Pioneer and Contemporary Studies in Social, Human and Administrative Sciences*, 125. Konak, Izmir: Duvar. https://www.researchgate.net/profile/Guler-GunesAslan/publication/372134441_Refugee_Return_and_the_Role_of_Social_Work_Challenges_Support_and_Sustainable_Integration/links/64a5f78895bbbe0c6e16ca26/Refugee-Return-and-the-Role-of-Social-Work-Challenges-Supp.
- Alverio, Gabriela N., Jeannie Sowers, and Erika Weinthal. 2015. "Not likely to go home: Syrian refugees and the challenges to Turkey—and the international community | Brookings." Brookings Institution. <https://www.brookings.edu/articles/not-likely-to-go-home-syrian-refugees-and-the-challenges-to-turkey-and-the-international-community/>.
- Amnesty International. 2016. "Turkey: The Human Rights Impact of the Syrian Refugee Crisis." <https://www.amnesty.org/en/location/europe-and-central-asia/western-central-and-south-eastern-europe/turkiye/report-turkiye/>.
- Amnesty International. 2018. "Turkey's Border Policy and Its Human Rights Implications." 2018. <https://www.amnesty.eu/news/turkey-government->

crackdown-suffocating-civil-society-through-deliberate-climate-of-fear-1116/.

Aras, N. Ela G., and Zeynep S. Mencutek. 2015. "The international migration and foreign policy nexus: the case of Syrian refugee crisis and Turkey." *Migration Letters* 12 (3): 193-208. <https://doi.org/10.33182/ml.v12i3.274>.

Baban, Feyzi, Suzan Ilkan, and Kim Rygiel. 2016. "Syrian refugees in Turkey: pathways to precarity, differential inclusion, and negotiated citizenship rights." *Journal of Ethnic and Migration Studies* 43 (1): 41-57. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2016.1192996>.

BBC. 2011. "Turki menjatuhkan sanksi kepada Suriah." https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/11/111130_turkey.

BBC. 2015. "Turki tembak jatuh pesawat Rusia di 'Suriah.'" https://www.bbc.com/indonesia/multimedia/2015/11/151124_turki_pesawat_rusia.

BBC. 2015. "Uni Eropa dan Turki teken kesepakatan bendung imigran." *BBC*, November 30, 2015. https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/11/151129_dunia_turki_unieropa.

Carlsnaes, Walter. 1992. "The Agency-Structure Problem in Foreign Policy Analysis." *International Studies Quarterly* 36 (3): 245-270. <https://doi.org/10.2307/2600772>.

Carlsnaes, Walter, Thomas Risse, and Beth A. Simmons. 2013. *Handbook of International Relations*. Second ed. London: Sage Publications.

Cebeci, Erol, and Sally Judson. 2014. *Syrian Refugees in Turkey*.

<https://setadc.org/syrian-refugees-in-turkey-2/>.

Donelli, Federico. 2018. "Syrian Refugees in Turkey: A Security Perspective."

Journal of Public Policy 30 (2): 6.

<https://scholarworks.umb.edu/nejpp/vol30/iss2/7>.

Düz, Zehra N. 2019. "Turkey remains committed to open-door policy." Anadolu

Agency.

[https://www.aa.com.tr/en/middle-east/-turkey-remains-](https://www.aa.com.tr/en/middle-east/-turkey-remains-committed-to-open-door-policy-/1563793)

[committed-to-open-door-policy-/1563793](https://www.aa.com.tr/en/middle-east/-turkey-remains-committed-to-open-door-policy-/1563793).

Ekmekci, Perihan E. 2018. "Syrian Refugees, Health and Migration Legislation in

Turkey." NCBI. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5028239/>.

Erdogan, M. 2020. "Syrian Refugees in Turkey: Beyond the Numbers." *Istanbul*

Bilgi University Press.

Erdogan, M. M. 2016. "Syrian refugees in Turkey: a burden or benefit?" *Stratejik*

Iletisim Merkezi.

[https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/DCAF-](https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/DCAF-STRATIM-Paper-2.pdf)

[STRATIM-Paper-2.pdf](https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/DCAF-STRATIM-Paper-2.pdf).

Esfahani, Arash N., and Hasan Hosseini. 2018. "Afghan Refugees and Iran's Open

Door Policy in the 1980s." *Jurnal Social Sciences & Humanities* 26:235-

252.

European Commission. 2016. "EU-Turkey Statement and Action Plan." (Brussels),

2016.

Fahham, A Muchaddam, and A.M Kartaatmaja. 2014. "Konflik Suriah : Akar

Masalah dan Dampaknya." 5 (1).

- Hamidi, Wahyu, and Muhammad Hasbi. 2014. "Analisis Pengaruh Migrasi Masuk Terhadap Permintaan Rumah Sederhana di Kota Pekanbaru." *Jurnal Ekonomi* 22 (September): 33-48.
- Hermawan, Sulistio. 2016. "Konflik di Suriah Pada Masa Bashar Al-Assad Tahun 2011-2015." 3 (10).
- Human Rights Watch. 2018. "Turkey's Approach to Refugee Rights: Balancing Security and Responsibility." 2018.
- Kayahan, Cantekin. n.d. "Turkey: Istanbul Governorate to Enforce Movement Restrictions on Syrians Under Temporary Protection." Library of Congress. Accessed July 15, 2023.
<https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2019-08-14/turkey-istanbul-governorate-to-enforce-movement-restrictions-on-syrians-under-temporary-protection/>.
- Khan, Hafeez U., and Waseem Khan. 2017. "Syria: History, The Civil War and Peace Prospects." *Journal of Political Studies* 24 (2): 592.
https://www.researchgate.net/publication/322315808_Syria_History_The_Civil_War_and_Peace_Prospects.
- Kirisci, Kemal. 2014. "Syrian Refugees and Turkey's Challenges: Going Beyond Hospitality."
- Luerdi. 2016. "Intervensi Turki Dalam Krisis Suriah (2011-2014)." *International Society* 3 (2).
- Ministry of Interior Turkey. 2017. "Border Security and Counter-Terrorism Efforts." 2017.

- Moleong, Lexy J. 2009. “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- The New York Times. 2012. “Turkey’s Parliament Backs Military Measures on Syria.” <https://www.nytimes.com/2012/10/05/world/middleeast/syria.html>.
- OECD. 2016. “Economic Survey of Turkey 2016.” 2016. https://www.oecd.org/en/publications/oecd-economic-surveys-turkey-2016_eco_surveys-tur-2016-en.html.
- Rizqullah, Muhammad F., Fadhillah J. Putri, Shania Afridita, and Halim Purnomo. 2020. “Syrian Refugees in Turkey: Implementation of Turkey Open Door Policy in Dealing with Syrian Refugees.” *Jurnal Dakwan dan Sosial* 3(02):111-124. <https://doi.org/10.37680/muharrrik.v3i02.394>.
- Sabah. 2016. “President Erdoğan: Turkey will continue open-door policy for Syrian refugees.” Daily Sabah. <https://www.dailysabah.com/politics/2016/03/13/president-erdogan-turkey-will-continue-open-door-policy-for-syrian-refugees>.
- Sahide, Ahmad, Syamsul Hadi, Siti M. Setiawati, and Bambang Cipto. 2016. “The Arab Spring: Membaca Kronologi dan Faktor Penyebabnya.” *Jurnal Hubungan Internasional* Vol 4 (No 2): 119. <http://dx.doi.org/10.18196/hi.2015.0072.118-129>.
- Suryantama, Muhammad D. 2021. “Turkey’s Open-Door Policy for Syrian Regugees: Humanity Motive and Political Motive.” *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia* 2(2):62-70. <https://doi.org/10.15408/jisi.v2i2.24927>.
- Turkish Red Crescent. 2017. “The Socioeconomic Impact of Syrian Refugees in Turkey.” 2017.

- UNHCR. 2014. "Law on Foreigners and International Protection." UNHCR.
https://www.unhcr.org/tr/wp-content/uploads/sites/14/2017/04/LoFIP_ENG_DGMM_revised-2017.pdf.
- UNHCR. 2016. "Syria Regional Refugee Response." <https://data.unhcr.org/>.
- UNHCR. 2019. "States Parties to the 1951 Convention and its 1967 Protocol."
<https://www.unhcr.org/protection/basic/3b73b0d63/states-parties-1951-convention-its-1967-protocol.html>.
- Wiryan, Rafi R., Amalia Azzahra, Dilla A. Nurshadrina, and Audrey C. Imanjaya. 2021. "Signifikansi Kebijakan "Open Door Policy" Turki di Bawah Presiden Tayyib Erdogan." *Jurnal Polinter* 6 (2).
<https://doi.org/10.52447/polinter.v6i2.4496>.
- World Bank. 2015. "Turkey's Response to the Syrian Refugee Crisis: Managing the Social and Economic Impacts." 2015.
- World Bank Group. 2020. "Syria Overview: Development news, research, data."
World Bank. <https://www.worldbank.org/en/country/syria/overview>.

